

PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA SAMARINDA TAHUN 2021



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
KOTA SAMARINDA**

PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA SAMARINDA TAHUN 2021

Tim Penyusun

Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum.

Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si.

Dr. Suryaningsi, M.H.

Dra. Endang Dwi Sulistyowati, M.Si.

Dra. Tri Wahyuningsih, M.Si.

Tetty Wijayanti, S.P., M.P.

Alfian Rokhmansyah, S.S., M.Hum.

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
KOTA SAMARINDA
DESEMBER 2021**

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan pertolongan sehingga penyusunan buku *Profil Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2021* ini dapat diselesaikan. Salah satu tujuan pembangunan dewasa ini adalah menuju kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap sektor pembangunan. Namun fenomenanya masalah ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap Perempuan yang diukur dengan angka Indeks Pembangunan Gender (*Gender-related Development Index* atau GDI) dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index* atau GEM). Selayaknya memang pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan keadilan gender yang menjadi salah satu syarat untuk mencapai hasil pembangunan yang adil gender dan membawa manfaat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Salah satu syarat untuk mencapai pembangunan yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender (KKG) adalah adanya analisis gender terhadap masing-masing program pembangunan yang dilaksanakan di semua sektor pembangunan. Sebagai data pembuka wawasan dalam PPRG, profil gender sangat dibutuhkan keberadaannya, terlebih merespons pembangunan yang berbasis *gender main streaming*.

Buku *Profil Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2021* ini terdiri atas lima bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Data Pilah Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2021, dan Bab 5 Penutup. Penyusunan buku *Analisis Data Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2021* ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kondisi, kebutuhan, serta persoalan yang dihadapi perempuan terkait dengan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan. Selain itu, data pilah ini diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar untuk penyusunan perencanaan, kebijakan dan program dalam upaya mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Demikian sebagai prakata dari kami, besar harapan kami laporan awal profil data pilah ini dapat memberi manfaat dan kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, Desember 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penulisan	3
C. Sasaran	4
1. Input	4
2. Output.....	4
3. Outcome	4
BAB II KAJIAN TEORI	1
A. Teori Gender	1
1. Teori Nurture.....	1
2. Teori Nature.....	2
3. Teori Equilibrium (keseimbangan)	2
4. Teori Struktural-Fungsional	3
5. Teori Sosial-Konflik.....	4
6. Teori Feminisme Liberal.....	5
7. Teori Feminisme Marxis-Sosialis.....	5
8. Teori Feminisme Radikal.....	5
9. Teori Ekofeminisme.....	6
10. Teori Psikoanalisis.....	6
B. Konsep Gender	7
1. Marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) perempuan.....	9
2. Subordinasi.....	9
3. Pandangan Stereotype.....	9
4. Kekerasan.....	9
5. Beban Kerja	9
C. Perspektif Sensitif Gender	9
1. Definisi Sensitivitas Gender	10
2. Sensitivitas Gender dalam Pembangunan Manusia	10
3. Kesetaraan Gender.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	13
A. Lokasi Penelitian	13
B. Sumber Data	13
C. Data yang Diperlukan	13
D. Metode Pengumpulan Data	13
E. Teknik Analisis Data	13
BAB IV DATA PILAH GENDER DAN ANAK KOTA SAMARINDA TAHUN 2021	15
A. Kependudukan	15
1. Jumlah Penduduk	15
2. Jumlah Kepala Keluarga.....	17

3.	Jumlah Rukun Tetangga.....	19
B.	Kesehatan	21
1.	Tenaga Kesehatan di Sarana Layanan Kesehatan	21
2.	Posyandu dan Posbindu PTM.....	22
3.	Kematian Ibu Maternal Menurut Sebab Penyakitnya dan Kelahiran Bayi	24
4.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4.....	26
5.	Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan.....	27
6.	Pelayanan Nifas.....	28
7.	Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang.....	30
8.	Balita Pendek (Stunting)	32
9.	Bayi dengan Asi Eksklusif.....	33
C.	Pendidikan	34
1.	Sekolah Dasar.....	34
2.	Sekolah Menengah Pertama.....	35
3.	Sekolah Menengah Atas	36
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK).....	38
5.	Angka Partisipasi Murni (APM).....	39
D.	Ketenagakerjaan dan Ekonomi	40
1.	Angkatan Kerja.....	40
2.	Pencari Kerja	41
3.	Usaha Mikro dan Kecil	42
E.	Sosial.....	43
1.	Penduduk Lanjut Usia Terlantar.....	43
2.	Anak Balita Terlantar.....	44
3.	Anak Terlantar	45
4.	Fakir Miskin.....	46
5.	Penyandang Disabilitas	47
F.	Pemerintahan.....	48
G.	Hukum	52
1.	Jaksa	52
2.	Hakim	54
3.	Panitera	54
4.	Polisi.....	55
5.	Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.....	56
H.	Usia Nikah	59
BAB V PENUTUP		61
DAFTAR PUSTAKA.....		62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda Tahun 2020	15
Tabel 2.	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda Tahun 2020	17
Tabel 3.	Jumlah Rukun Tetangga Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda Tahun 2020	20
Tabel 4.	Jumlah Tenaga Kesehatan di Sarana Layanan Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2020	22
Tabel 5.	Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kota Samarinda Tahun 2020	23
Tabel 6.	Jumlah Kematian Ibu Maternal Menurut Sebab Penyakitnya Kota Samarinda Tahun 2020	24
Tabel 7.	Jumlah Kelahiran Bayi Kota Samarinda Tahun 2020	25
Tabel 8.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 Kota Samarinda Tahun 2020	26
Tabel 9.	Jumlah Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2020	27
Tabel 10.	Jumlah Pelayanan Nifas Kota Samarinda Tahun 2020	28
Tabel 11.	Jumlah Balita Gizi Buruk dan Jumlah Balita Gizi Kurang Tahun 2020	30
Tabel 12.	Jumlah Balita Gizi Lebih dan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan Tahun 2020	31
Tabel 13.	Jumlah Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Tahun 2020	31
Tabel 14.	Jumlah Balita Pendek Stunting Tahun 2020	32
Tabel 15.	Jumlah Bayi mendapatkan Asi Eksklusif selama 6 bulan Tahun 2020	33
Tabel 16.	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Tingkat Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2020	34
Tabel 17.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2020	35
Tabel 18.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2020	36
Tabel 19.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020	38
Tabel 20.	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Samarinda Tahun 2020	39
Tabel 21.	Data Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020	40
Tabel 22.	Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Samarinda Tahun 2020	41
Tabel 23.	Jumlah IUMK Kota Samarinda Tahun 2020	42
Tabel 24.	Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Kota Samarinda Tahun 2020	43
Tabel 25.	Jumlah Anak Balita Terlantar Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020	44
Tabel 26.	Jumlah Anak Terlantar Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020	45

Tabel 27.	Jumlah Fakir Miskin Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020	46
Tabel 28.	Jumlah Penyandang Disabilitas (Cacat) Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020	47
Tabel 29.	Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020	48
Tabel 30.	Jumlah ASN Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020	48
Tabel 31.	Jumlah ASN Menurut Eselon dan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020	50
Tabel 32.	Jumlah ASN Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020	51
Tabel 33.	Jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Samarinda Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020	53
Tabel 34.	Jumlah Jaksa Negeri Samarinda yang Terlatih dalam Penuntutan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	53
Tabel 35.	Jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Kota Samarinda Tahun 2020	54
Tabel 36.	Jumlah Panitera di Pengadilan Negeri Kota Samarinda Tahun 2020	54
Tabel 37.	Personel Polresta Samarinda Berdasarkan Kepangkatan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020	55
Tabel 38.	Jumlah Pegawai Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020	57
Tabel 39.	Jumlah Penghuni Rumah Tahanan Kelas II A di Kota Samarinda Tahun 2020	57
Tabel 40.	Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020	57
Tabel 41.	Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II di Kota Samarinda Tahun 2020	58
Tabel 42.	Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020	58
Tabel 43.	Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Kota Samarinda Tahun 2020	58
Tabel 44.	Usia Nikah di Wilayah Kota Samarinda Tahun 2020	59
Tabel 45.	Status Mempelai pada Saat Pernikahan di Wilayah Kota Samarinda Tahun 2020	60

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu gender dalam konteks kekinian masih terus muncul dan selalu menjadi perdebatan banyak pihak, bahkan intensitasnya semakin menguat mengingat masih banyaknya permasalahan yang dihadapi kaum perempuan terkait dengan ketidakadilan dalam memperoleh hak sosial dan ekonomi. Isu paling baru adalah bagaimana seseorang mahasiswi dari sebuah perguruan tinggi terkenal yang mengalami kekerasan seksual dan sampai hamil dan kekerasan psikis dari keluarga pacar. Mahasiswi tersebut meninggal karena bunuh diri di kuburan ayahnya karena tidak kuat menahan tekanan dari pacarnya (seorang anggota polisi) untuk menggugurkan kandungan (2021). Dan sebetulnya masih banyak lagi kasus-kasus lain menimpa kaum perempuan yang belum terungkap semuanya. Fenomena ini menunjukkan, kaum perempuan sampai saat ini belum memperoleh perlindungan selayaknya dalam konteks kesetaraan dan keadilan gender (Quraisy & Nawir, 2017; Zakia, 2011).

Partners for Law in Development (PLD, 2004) dalam CEDAW: konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, bahwa peranan negara dalam hal ini pemerintah sangat dibutuhkan, karena melalui kewenangan mampu memberikan perlindungan terhadap segala bentuk ketidakadilan yang menyangkut hak asasi. Kewajiban negara tidak boleh dipandang hanya sebagai satu elemen dari traktat tetapi merupakan konsep penting dan integral dari kerangka kesetaraan dan nondiskriminasi yang dikandung dalam konvensi. Di samping itu sebagai pendukung konstruksi kesetaraan dan nondiskriminasi terhadap perempuan, kewajiban negara menggunakan definisi kesetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan cakupan pelaksanaannya. Kaitan antara kewajiban negara, kesetaraan, dan nondiskriminasi memiliki sifat interaktif, ketiganya merupakan perpaduan yang membangun pendekatan mengenai hak asasi perempuan tidak menutup kemungkinan masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan di beberapa hal pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi serta bidang politik (Elomäki, 2018; Fauziah & Mashudi, 2017; Hansmann & Schröter, 2018).

Untuk keperluan perbaikan berbagai bidang tersebut diperlukan data pilah yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, perempuan dan pengambilan keputusan, kesetaraan gender dan kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan anak dan tumbuh kembang anak. Dengan tersedianya data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin ini lebih memudahkan dalam mendeskripsikan adanya ketimpangan gender di masyarakat sehingga tampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Kang, Hense, Scheerso, & Keinonen, 2019). Penyediaan data gender tersebut harus berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Peranan Perempuan Nomor 06/KEP/MENUPW/III/1995 tentang pedoman Penyusunan Profil Kedudukan dan Peranan Perempuan Indonesia Tingkat Daerah, agar dapat keseragaman dalam pengumpulan data dan menjadi masukan bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Konsep gender bukanlah sesuatu yang baru. Namun untuk menyamakan persepsi terkait konsep gender perlu disampaikan kepada masyarakat. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender (Aksoy, 2018). Pendapat lain seperti

Haraldsson menegaskan bahwa gender merupakan sebagian dari konsep diri yang melibatkan identifikasi individu sebagai seorang laki-laki atau perempuan (Haraldsson & Wängnerud, 2019; Hasan, 2019). Dengan mencermati beberapa pendapat sebelumnya dapat ditarik simpulan bahwa pemahaman gender selalu dihubungkan dengan sesuatu yang merujuk pada sifat yang melekat pada diri manusia, baik pada laki-laki maupun perempuan.

Gender tidak memiliki perbedaan, semua manusia baik berjenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki potensi karakter yang sama satu dengan yang lainnya (Malau, 2015). Dengan demikian tidak ada sekat spesialisasi di antaranya dalam pembahasan gender. Berbeda jika kita membahas Seks (jenis kelamin) yang merujuk pada kodrati Tuhan, pemberian dan ciptaan Tuhan. Disebutkan bahwa hal tersebut melekat dalam diri manusia, yakni laki-laki dan perempuan. Perempuan yang mampu mengandung, menyusui dan melahirkan dan menstruasi, sementara laki-laki membuahi. Faktor biologis, fisiologis tersebut sudah merupakan kodrat Illahi dan tidak dapat bahkan menjadi pantangan dalam agama jika diubah.

Perempuan merupakan salah satu manusia yang memiliki potensi untuk berkarya dan mengembangkan diri untuk mengondisikan kehidupan yang nyaman bersama keluarga. Secara umum dalam psikologi perempuan memiliki karakter yang cenderung lebih sabar, teliti dan cermat dari lelaki (Fujiati, 2014; Suhllpti, 2016). Namun, tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa kaum laki-laki yang juga cermat, teliti dan sabar. Namun, fenomena gender yakni laki-laki dan perempuan menjadi salah satu isu dan permasalahan kini. Banyak yang disadari bahwa ada permasalahan gender, diskriminasi, pemenuhan hak, stereotip dan lain sebagainya tanpa orang banyak sadari bahwa beberapa tindakan-tindakan sehari-hari memiliki arah pendiskriminasian gender.

Di Kota Samarinda, beberapa hari terakhir ini masih ada beberapa catatan buram terkait dengan perempuan. Salah satu media berita lokal di kota Samarinda menegaskan bahwa Samarinda merupakan kota yang menduduki peringkat pertama perihal kasus kekerasan seksual di antara 10 kabupaten/kota lainnya di Kaltim. Tercatat, sebanyak 173 kasus terjadi pada 2021 ini. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim per tanggal 1 Desember 2021, angka tersebut menurun dari 2019 sebanyak 305 kasus, dan pada 2020 sebanyak 286 kasus. Kendati begitu, Samarinda masih tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya di Benua Etam saat ini. Masih berdasarkan data dari DKP3A Kaltim, di 2021 ini terdapat total 190 korban kekerasan seksual di Kota Samarinda. Sebanyak 87 korbannya adalah perempuan dewasa, dan 77 korban lainnya adalah anak perempuan. Diketahui pula 30 persen dari total 394 kasus kekerasan seksual di Kaltim 2021 ini, korban merupakan pelajar tingkat SLTA. Mencermati beberapa kasus yang ada Pemerintah Kota Samarinda bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait untuk meningkatkan intensitas pembinaan agar korban kekerasan seksual mau melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.

Dengan melakukan pendampingan dan pembinaan melalui pendidikan kritis bagi masyarakat agar sadar dan sensitif terhadap lingkungan sekitar untuk berani melaporkan bila terjadi kekerasan pada perempuan dan anak maka akan terputus mata rantai kekerasan pada perempuan dan anak. Dengan melapor maka muaranya itu pelaku dapat dihukum dengan hukuman berat dan efek jera, sehingga angka kasus kekerasan pun dapat terminimalisir. Potret permasalahan tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan guna menekankan permasalahan-permasalahan perempuan di Kota Samarinda . Karena, perempuan merupakan salah satu harapan bangsa, dan pencetak generasi bangsa.

Peran perempuan dalam pembangunan bangsa dimakna merupakan pencetak generasi bangsa, karena dari rahim seorang perempuanlah, tercetak pemimpin-pemimpin dan generasi masa depan bangsa. Tidak ada pahlawan atau pemimpin heroik suatu negara tanpa lahir dari rahim seorang perempuan. Oleh karena itu, sosok perempuan yang kemudian juga harus dimuliakan dalam kehidupan. Pemerintah Daerah sebagai agen pelayanan publik harus menjadi salah satu penggerak aktif dalam ranah perlindungan, pencegahan, dan advokasi perempuan yang terkena korban kekerasan dan korban lainnya. Selain itu KOMNAS Perempuan, serta *Non-Government Organization* (NGO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat bersama-sama berpartisipasi untuk mencegah tindak kekerasan pada perempuan. Tidak hanya perempuan saja yang kerap menjadi korban kekerasan, Anak juga kerap menjadi korban kekerasan, pelecehan seksual dan lainnya. Oleh karenanya dalam satu instansi perlindungan perempuan kerap disandingkan dengan anak. Seperti halnya salah satu instansi kelembagaan negara yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A). Selain perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan juga diperlukan guna meningkatkan derajat pendapatan ekonomi dan nilai hidup bagi kaum perempuan. Peralunya, ada beberapa permasalahan terkait *Gender Identity, Gender Norm, Gender Role* yang sangat membatasi peran perempuan dalam berkarya dan melakukan kerja-kerja di masyarakat. Diskriminasi pembagian kerja menurut identitas dan beban posisi kerja, norma dan sistem nilai sosial perempuan bekerja di rumah (ranah domestik) sementara para laki-laki yang di luar (publik), dan pembagian peran pekerjaan dan karya berdasar gender. Hal tersebut yang menjadi suatu permasalahan bagi perempuan, serta membatasi perkembangan perempuan menjadi manusia seutuhnya yang seharusnya memiliki derajat dan kesetaraan dalam gender yang sama.

Dalam pencegahannya, pemerintah daerah tidak hanya memiliki inisiatif melakukan pencegahan melalui kelembagaan, namun sebenarnya juga sudah tertuang pada beberapa regulasi dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya yakni Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga guna melakukan perlindungan, pencegahan dan advokasi pada perempuan dan anak.

Pentingnya dokumen ini dibuat untuk mengukur dan mengetahui kondisi gender di Kota Samarinda. Diketuinya data dan realitas kondisi gender di Kota Samarinda diharapkan mampu menunjang dan sebagai acuan data bagi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (*Non Government Organization*) untuk mengangkat kesejahteraan perempuan, melalui perencanaan, pengorganisasian program pembangunan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan program dan kegiatan yang berkenaan dengan perempuan.

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan buku *Profil Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2021* ini sebagai berikut.

1. Sebagai acuan dan pedoman data gender dalam melakukan kerja-kerja perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, program yang mengangkat tema gender.
2. Sebagai referensi data isu strategis gender di Kota Samarinda.
3. Sebagai acuan pengamatan dan pemetaan kekuatan atau potensi, kelemahan, peluang dan ancaman tentang gender di Kota Samarinda.
4. Menunjang misi strategis Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Samarinda.
5. Ketersediaan data pilah gender di Kota Samarinda.

C. Sasaran

Sasaran dalam dokumen ini adalah penggalan data gender yang menyangkut segala aspek baik isu pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, hukum, pertanian, sosial budaya, lingkungan dan data kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Samarinda.

1. Input

Berikut beberapa *input* (masukan), dalam penulisan dan pembuatan Buku *Analisis Data Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2021*. *Input* ini yang menjadi dasar atau *core* inti acuan data dari kondisi gender di Kota Samarinda adalah:

- a. ketersediaan data dan informasi dari pihak pemerintahan terkait isu gender yang menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan
- b. informasi, data dan masukan dari institusi atau lembaga resmi yang berkecimpung di dunia gender di kota Samarinda.

2. Output

Output (Hasil) yang akan disusun dalam penulisan buku *Analisis Data Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2021* ini berupa:

- a. hasil identifikasi kondisi data pilah kota Samarinda menurut beberapa indikator dan ukuran perhitungan;
- b. identifikasi isu strategis dan permasalahan terkait persoalan gender; dan
- c. buku *Profil Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2021*.

3. Outcome

Adapun beberapa hasil yang ingin kami capai dan harapkan (*outcome*) dari penulisan buku *Profil Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2021* sebagai berikut:

- a. terakumulasi dan terdokumentasinya satu sajian buku yang menghimpun keseluruhan data mengenai gender, tepatnya buku *Profil Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2021*;
- b. menjadi acuan bagi pemerintah dalam upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah;
- c. menjadi salah satu alternatif, atau opsi atau bahan identifikasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan manusia dalam pembangunan manusia di segala aspek bidang kehidupan; dan
- d. basis, acuan atau pedoman data gender yang dapat digunakan untuk menyusun, merencanakan, dan melaksanakan kebijakan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang berkenaan dengan gender.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Gender

Secara khusus tidak ditemukan suatu teori yang membicarakan masalah gender. Teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan gender, terutama bidang sosial kemasyarakatan dan kejiwaan. Karena itu teori-teori yang digunakan untuk mendekati masalah gender ini banyak diambil dari teori-teori sosiologi dan psikologi. Cukup banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli, terutama kaum feminis, untuk memperbincangkan masalah gender, tetapi dalam kesempatan ini akan dikemukakan beberapa saja yang dianggap penting dan cukup populer.

Terkait dengan teori gender, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, dalam buku Bunga Rampai Bahan Pembelajaran, Pelatihan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, disebutkan setidaknya ada dua teori dasar yaitu Teori *Nurture* dan Teori *Nature*. Namun dalam perkembangannya untuk menyeimbangkan kedua teori tersebut maka lahirlah Teori *Equilibrium*. Teori ini merupakan kompromistis atau keseimbangan dari dua teori *Nurture* dan Teori *Nature*. Secara rinci teori-teori tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Teori *Nurture*

Menurut Teori *Nurture* adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki identik dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai proletar (Rokhmansyah, 2016).

Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh Kaum Feminis Internasional yang cenderung mengejar kesamaan (*sameness*) dengan konsep 50:50 (*fifty-fifty*), konsep yang kemudian dikenal dengan istilah *perfect equality* (kesamaan kuantitas). Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan baik dari nilai agama maupun budaya. Berangkat dari kenyataan tersebut, para Feminis berjuang dengan menggunakan pendekatan sosial konflik, yaitu konsep yang diilhami Karl Marx (1818—1883) dan Machiavvelli (1469—1527) dilanjutkan oleh David Lockwood (1957) dengan menerapkan konsep dialektika.

Randall Collins (1987) beranggapan keluarga adalah wadah tempat pemaksaan, suami sebagai pemilik dan wanita sebagai abdi. Magrit Eichlen beranggapan bahwa keluarga dan agama adalah sumber terbentuknya budaya dan perilaku diskriminasi gender (Collins, 1987). Konsep sosial politik menempatkan kaum laki-laki sebagai kaum penindas (*borjuis*) dan perempuan sebagai kaum tertindas (*proletar*) bagi kaum *proletar* tidak ada pilihan lain kecuali dengan perjuangan menyingkirkan penindas demi untuk mencapai kebebasan dan persamaan.

Aliran *Nurture* melahirkan Paham Sosial Konflik yang banyak dianut masyarakat sosialis komunis yang menghilangkan strata penduduk (*egalitarian*) (Sevelius, 2013). Paham Sosial Konflik memperjuangkan kesamaan proporsional (*perfect equality*) dalam segala aktivitas masyarakat seperti di DPR, militer, manajer, menteri, gubernur, pilot dan pimpinan partai politik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibuatlah program khusus (*affirmatif action*) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan agar bisa termotivasi untuk merebut posisi yang selama ini didominasi oleh laki-laki (Utaminingsih, 2017). Akibatnya sudah dapat diduga, yaitu timbulnya reaksi negatif dari laki-laki yang apriori terhadap perjuangan tersebut yang dikenal dengan perilaku “*male backlash*”. Di Indonesia, program *affirmatif action* mulai tampak ditandai oleh adanya pergeseran pemilihan jurusan bagi peserta didik yang dulu jurusan IPA didominasi laki-laki, sekarang jurusan IPA didominasi peserta didik perempuan.

2. Teori Nature

Menurut Teori *Nature*, adanya perempuan dan laki-laki adalah kodrat, sehingga harus diterima Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak dapat karena memang berbeda secara kodrat alamiah. Dalam proses perkembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan Teori *Nurture* di atas, lalu beralih ke Teori *Nature*. Pendekatan *Nurture* dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam berkeluarga dan bermasyarakat.

Perbedaan biologis diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat naluri (*instinct*). Perjuangan kelas tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan, karena manusia memerlukan kemitraan dan kerja sama secara struktural dan fungsional. Manusia, baik perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial ada pembagian tugas (*division of labor*) begitu pula dalam kehidupan keluarga (Puspitawati, 2012). Harus ada kesepakatan antara suami dan istri, siapa yang menjadi kepala keluarga dan siapa yang menjadi ibu rumah tangga. Dalam organisasi sosial juga dikenal ada pimpinan dan ada bawahan (anggota) yang masing-masing mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban yang berbeda dalam mencapai tujuan. Tidak mungkin satu kapal dikomandani oleh dua nakhoda (Udasmoro, 2018). Paham ini diajarkan Socrates dan Plato, yang kemudian diperbaharui oleh August Comte (1798—1875), dan Emile Durkheim (1858—1917) dan Herbert Spencer (1820—1930) yang mengatakan bahwa kehidupan kebersamaan didasari oleh pembagian kerja dan tanggung jawab.

Parsons & Bales berpendapat bahwa keluarga adalah sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan istri untuk saling melengkapi dan saling bantu membantu satu sama lain (Carroll & Campbell, 2008). Karena itu peranan keluarga semakin penting dalam masyarakat modern terutama dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara laki-laki dan perempuan, dan hal ini dimulai sejak dini melalui pola pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga (Bales, 2017).

Aliran ini melahirkan paham Struktural fungsional yang menerima perbedaan peran, asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan (komitmen) antara suami istri dalam keluarga atau antara kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat (Andik Wahyun Muqoyyidin, 2013).

3. Teori *Equilibrium* (keseimbangan)

Di samping kedua aliran tersebut, terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki (Bragg, Renold, Ringrose, & Jackson, 2018). Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap

kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan di antara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain. Tawney menyebutkan bahwa keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada hakikatnya adalah realitas kehidupan manusia (Mulawarman & Rokhmansyah, 2018).

4. Teori Struktural-Fungsional

Teori atau pendekatan struktural-fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga (Adibah, 2017). Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling memengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat (Agung, 2015). Banyak sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20, di antaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons.

Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi sosial pasti ada anggota yang mampu menjadi pemimpin, ada yang menjadi sekretaris atau bendahara, dan ada yang menjadi anggota biasa. Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat (Agung, 2015; Bahri, 2016). Terkait dengan peran gender, pengikut teori ini menunjuk masyarakat praindustri yang terintegrasi di dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh *sex* (jenis kelamin).

Menurut para penganutnya, teori struktural-fungsional tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Parsons & Bales menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah suatu yang wajar (Sidi, 2014). Dengan pembagian kerja yang seimbang, hubungan suami-istri bisa berjalan dengan baik. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih antar fungsi, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Keseimbangan akan terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula.

Teori struktural-fungsional ini mendapat kecaman dari kaum feminis, karena dianggap membenarkan praktik yang selalu mengaitkan peran sosial dengan jenis kelamin. Laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan perempuan diposisikan dalam urusan domestik, terutama dalam masalah reproduksi. Menurut Sylvia Walby teori ini akan ditinggalkan secara total dalam masyarakat modern. Sedang Lindsey menilai teori ini akan melanggengkan dominasi laki-laki dalam stratifikasi gender di tengah-tengah masyarakat (Juwita, Firman, Rusdinal, Aliman, & Malang, 2020).

Meskipun teori ini banyak memperoleh kritikan dan kecaman, teori ini masih tetap bertahan terutama karena didukung oleh masyarakat industri yang cenderung tetap mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi industri yang menekankan aspek produktivitas.

Jika faktor produksi diutamakan, maka nilai manusia akan tampil tidak lebih dari sekedar alat produksi. Nilai-nilai fundamental kemanusiaan cenderung diabaikan. Karena itu, tidak heran dalam masyarakat kapitalis, “industri seks” dapat diterima secara wajar. Yang juga memperkuat pemberlakuan teori ini adalah karena masyarakat modern-kapitalis, menurut Foucault dan Hartman, cenderung mengakomodasi sistem pembagian kerja berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Akibatnya, posisi perempuan akan tetap lebih rendah dan dalam posisi marginal, sedang posisi laki-laki lebih tinggi dan menduduki posisi sentral (Davies, 2018).

5. Teori Sosial-Konflik

Suasana konflik akan selalu mewarnai masyarakat, terutama dalam hal distribusi sumber daya yang terbatas. Sifat pementingan diri, menurutnya, akan menyebabkan diferensiasi kekuasaan yang ada menimbulkan sekelompok orang menindas kelompok lainnya. Perbedaan kepentingan dan pertentangan antar individu pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dalam suatu organisasi atau masyarakat (Rosana, 2015).

Masalah gender dalam teori sosial-konflik terkadang diidentikkan dengan teori Marx, karena begitu kuatnya pengaruh Marx di dalamnya. Marx yang kemudian dilengkapi oleh F. Engels, mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga (Zuldin, 2019). Hubungan laki-laki perempuan (suami-istri) tidak ubahnya dengan hubungan proletar dan borjuis, hamba dan tuan, atau pemeas dan yang diperas. Dengan kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena kodrat dari Tuhan, tetapi karena konstruksi masyarakat. Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh para pengikut Marx seperti F. Engels, R. Dahrendorf, dan Randall Collins.

Asumsi yang dipakai dalam pengembangan teori sosial-konflik, atau teori determinisme ekonomi Marx, bertolak belakang dengan asumsi yang mendasari teori struktural-fungsional, yaitu: 1) walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang sistemis, pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Hal ini membuktikan bahwa sistem sosial secara sistematis menghasilkan konflik; 2) maka konflik adalah suatu yang tak terhindarkan dalam semua sistem sosial; 3) konflik akan terjadi dalam aspek pendistribusian sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan; dan 4) konflik adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat (Ihsan, 2017).

Menurut Engels dalam Nasaruddin, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan kontrol laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi perempuan. Seolah-olah Engels mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis atas kaum pekerja. Penurunan status perempuan mempunyai korelasi dengan perkembangan produksi perdagangan

Keluarga, menurut teori ini, bukan sebuah kesatuan yang normatif (harmonis dan seimbang), melainkan lebih dilihat sebagai sebuah sistem yang penuh konflik yang menganggap bahwa keragaman biologis dapat dipakai untuk melegitimasi relasi sosial yang operatif. Keragaman biologis yang menciptakan peran gender dianggap konstruksi budaya, sosialisasi kapitalisme, atau patriarkat. Menurut para feminis Marxis dan sosialis institusi yang paling eksis dalam melanggengkan peran gender adalah keluarga dan agama, sehingga usaha untuk menciptakan *perfect equality* (kesetaraan gender 50:50) adalah dengan menghilangkan peran biologis gender, yaitu dengan usaha radikal untuk mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang menciptakannya (Bales, 2017).

Teori sosial-konflik ini juga mendapat kritik dari sejumlah pakar, terutama karena teori ini terlalu menekankan faktor ekonomi sebagai basis ketidakadilan yang selanjutnya melahirkan konflik. Dahrendorf dan R. Collins, yang tidak sepenuhnya setuju dengan Marx dan Engels, menganggap konflik tidak hanya terjadi karena perjuangan keras dan ketegangan antara pemilik dan pekerja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, termasuk ketegangan antara orang tua dan anak, suami dan istri, senior dan junior, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, teori ini banyak diikuti oleh para feminis modern yang kemudian banyak memunculkan teori-teori baru mengenai feminisme, seperti feminisme liberal, feminisme Marxis-sosialis, dan feminisme radikal (Aisyah, 2013).

6. Teori Feminisme Liberal

Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun demikian, kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal masih tetap ada perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat. Teori kelompok ini termasuk paling moderat di antara teori-teori feminisme. Pengikut teori ini menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik (Rosmayati, 2019; Sarasjati, 2016; Zaini, 2014).

7. Teori Feminisme Marxis-Sosialis

Feminisme ini bertujuan mengadakan restrukturisasi masyarakat agar tercapai kesetaraan gender. Ketimpangan gender disebabkan oleh sistem kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan *division of labour*, termasuk di dalam keluarga. Gerakan kelompok ini mengadopsi teori *praxis* Marxisme, yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas, agar kaum perempuan sadar bahwa mereka merupakan 'kelas' yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran ini adalah usaha untuk membangkitkan rasa emosi para perempuan agar bangkit untuk mengubah keadaan. Berbeda dengan teori sosial-konflik, teori ini tidak terlalu menekankan pada faktor akumulasi modal atau pemilikan harta pribadi sebagai kerangka dasar ideologi. Teori ini lebih menyoroti faktor seksualitas dan gender dalam kerangka dasar ideologinya. Teori ini juga tidak luput dari kritikan, karena terlalu melupakan pekerjaan domestik. Marx dan Engels sama sekali tidak melihat nilai ekonomi pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik hanya dianggap pekerjaan marginal dan tidak produktif. Padahal semua pekerjaan publik yang mempunyai nilai ekonomi sangat bergantung pada produk-produk yang dihasilkan dari pekerjaan rumah tangga, misalnya makanan yang siap dimakan, rumah yang layak ditempati, dan lain-lain yang memengaruhi pekerjaan publik tidak produktif. Kontribusi ekonomi yang dihasilkan kaum perempuan melalui pekerjaan domestiknya telah banyak diperhitungkan oleh kaum feminis sendiri. Kalau dinilai dengan uang, perempuan sebenarnya dapat memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dari sektor domestik yang dikerjakannya (Widayanti, Hidayat, & Handayani, 2018).

8. Teori Feminisme Radikal

Teori ini berkembang pesat di Amerika Serikat pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an. Meskipun teori ini hampir sama dengan teori feminisme Marxis-sosialis, teori ini lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki,

keluarga dianggapnya sebagai institusi yang melegitimasi dominasi, laki-laki (patriarki), sehingga perempuan tertindas. Feminisme ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan. Elsa Gidlow mengemukakan teori bahwa menjadi lesbian adalah telah terbebas dari dominasi laki-laki, baik internal maupun eksternal. Martha Shelley selanjutnya memperkuat bahwa perempuan lesbian perlu dijadikan model sebagai perempuan mandiri. Karena keradikalannya, teori ini mendapat kritikan yang tajam, bukan saja dari kalangan sosiolog, tetapi juga dari kalangan feminis sendiri. Tokoh feminis liberal tidak setuju sepenuhnya dengan teori ini. Persamaan total antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya akan merugikan perempuan sendiri. Laki-laki yang tidak terbebani oleh masalah reproduksi akan sulit diimbangi oleh perempuan yang tidak bisa lepas dari beban ini (Sarasjati, 2016; Zaini, 2014)

9. Teori Ekofeminisme

Teori ekofeminisme muncul karena ketidakpuasan akan arah perkembangan ekologi dunia yang semakin bobrok. Teori ini mempunyai konsep yang bertolak belakang dengan tiga teori feminisme modern seperti di atas. Teori-teori feminisme modern berasumsi bahwa individu adalah makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Sedangkan teori ekofeminisme melihat individu secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Menurut teori ini, apa yang terjadi setelah para perempuan masuk ke dunia maskulin yang tadinya didominasi oleh laki-laki adalah tidak lagi menonjolkan kualitas femininnya, tetapi justru menjadi *male clone* (tiruan laki-laki) dan masuk dalam perangkap sistem maskulin yang hierarkis. Masuknya perempuan ke dunia maskulin (dunia publik umumnya) telah menyebabkan peradaban modern semakin dominan diwarnai oleh kualitas maskulin. Akibatnya, yang terlihat adalah kompetisi, *self-centered*, dominasi, dan eksploitasi. Contoh nyata dari cerminan memudarnya kualitas feminin (cinta, pengasuhan, dan pemeliharaan) dalam masyarakat adalah semakin rusaknya alam, meningkatnya kriminalitas, menurunnya solidaritas sosial, dan semakin banyaknya perempuan yang menelantarkan anak-anaknya (Buckingham, 2004; Salleh, 2017)

10. Teori Psikoanalisis

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1939). Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun di atas tiga struktur, yaitu *id*, *ego*, dan *superego*. Tingkah laku seseorang menurut Freud ditentukan oleh interaksi ketiga struktur itu. *Id* sebagai pembawaan sifat-sifat fisik biologis sejak lahir. *Id* bagaikan sumber energi yang memberikan kekuatan terhadap kedua sumber lainnya. *Ego* bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif dari *id*. *Ego* berusaha mengatur hubungan antara keinginan subjektif individual dan tuntutan objektif realitas sosial. *Superego* berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian dan selalu mengingatkan *ego* agar senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol *id*.

Menurut Freud kondisi biologis seseorang adalah masalah takdir yang tidak dapat diubah. Pada tahap *phallic stage*, yaitu tahap seorang anak memperoleh kesenangan pada saat mulai mengidentifikasi alat kelaminnya, seorang anak memperoleh kesenangan erotis dari penis bagi anak laki-laki dan klitoris bagi anak perempuan. Pada tahap ini (usia 3-6 tahun) perkembangan kepribadian anak laki-laki dan perempuan mulai berbeda. Perbedaan ini melahirkan pembedaan formasi sosial berdasarkan identitas gender, yakni bersifat laki-laki dan perempuan (Bertens, 2006).

Pada tahap *phallic* seorang anak laki-laki berada dalam puncak kecintaan terhadap ibunya dan sudah mulai mempunyai hasrat seksual. Ia semula melihat ayahnya sebagai saingan dalam memperoleh kasih sayang ibu. Tetapi karena takut ancaman dari ayahnya, seperti dikebiri, ia tidak lagi melawan ayahnya dan menjadikannya sebagai idola (model). Sebaliknya, ketika anak perempuan melihat dirinya tidak memiliki penis seperti anak laki-laki, tidak dapat menolak kenyataan dan merasa sudah “terkebiri”. Ia menjadikan ayahnya sebagai objek cinta dan menjadikan ibunya sebagai objek iri hati.

Pendapat Freud ini mendapat protes keras dari kaum feminis, terutama karena Freud mengungkapkan kekurangan alat kelamin perempuan tanpa rasa malu. Teori psikoanalisis Freud sudah banyak yang didramatisasi kalangan feminis. Freud sendiri menganggap kalau pendapatnya masih tentatif dan masih terbuka untuk dikritik.

Freud tidak sama sekali menyudutkan kaum perempuan. Teorinya lebih banyak didasarkan pada hasil penelitiannya secara ilmiah. Untuk itu teori Freud ini justru dapat dijadikan pijakan dalam mengembangkan gerakan feminisme dalam rangka mencapai keadilan gender. Karena itu, penyempurnaan terhadap teori ini sangat diperlukan agar dapat ditarik kesimpulan yang benar. Itulah beberapa teori-teori gender yang dapat digunakan untuk memahami berbagai persoalan gender dalam kehidupan kita. Tentu saja masih banyak lagi teori-teori atau pendekatan-pendekatan lain yang bisa digunakan untuk memahami persoalan gender, misalnya pendekatan fenomenologi, pendekatan agama, teori-teori ekonomi, dan teori-teori sosial lainnya.

B. Konsep Gender

Kata “jender” berasal dari bahasa Inggris, *gender*, berarti “jenis kelamin”. Dalam *Webster’s New World Dictionary*, gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.” Untuk memahami konsep gender harus dibedakan terlebih dahulu kata *gender* dengan kata *seks* (jenis kelamin), Jenis kelamin (*sex*) memiliki pengertian penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Pembagian tersebut berdasarkan pada perbedaan fisiologis yang berhubungan dengan fungsi reproduksi dan pembagian jenis kelamin ini berlaku untuk semua makhluk yang bereproduksi (Lott & Maluso, 1993). Lott & Maluso (1993) menyatakan bahwa gender adalah untuk manusia dan mengandung arti semua atribut kompleks terhadap laki-laki dan perempuan yang berasal dari budaya. Gender dikonstruksikan dan dipelajari dari kondisi, pengalaman dan kemungkinan-kemungkinan tertentu yang berbeda pada setiap budaya, yang dipasangkan dengan kewanitaan dan kelaki-lakian, dan ini merupakan kategori sosial utama yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat sebagai dasar untuk sosialisasi dan untuk penentuan status sosial (Millar & O’Doherty, 2020). Menurut Best dan Williams (1993) gender tidak lain adalah konsepsi bersama (masyarakat) tentang kapasitas maskulin dan feminin yang membangun gambaran ideal figur laki-laki dan perempuan yang merupakan harapan sekaligus pula tuntutan yang dikenakan pada tiap-tiap individu untuk menjalankan peran jenisnya tersebut dalam masyarakat.

Pendapat di atas senada dengan yang dikatakan Andrew Edgar dan Peter Sedgwick “*The concept of ‘gender’ is typically placed in opposition to concept of ‘sex’ While our sex (female / male) is a matter of biology, our gender . (feminine / masculine) is a matter of culture.*” *While our sex (female / male) is a matter of biology, our gender (feminine / masculine) is a matter of culture*”.

Gender sebagai konstruksi sosial dapat dibuktikan dengan karakteristik atribut-atribut tersebut yang bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan dan atribut-atribut tersebut bisa berubah dari waktu ke waktu, berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya, dan berbeda pada satu kelas dengan kelas lainnya (Fakih, 2001; Viswewaran, 1997). Menurut Fakih (2001) perbedaan-perbedaan gender tersebut terbentuk karena banyak hal, di

antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial atau kultural, melalui ajaran agama maupun negara.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara etimologis makna gender identik dengan makna *sex* yang berarti jenis kelamin. Sedang secara terminologi gender dan *sex* memiliki makna yang sangat berbeda, meskipun masih memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Gender adalah atribut-atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang sifatnya dapat dipertukarkan dan dikonstruksikan oleh budaya. Dengan demikian, gender akan tergantung pada nilai dan norma yang dianut masyarakat dalam menentukan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperilaku. Atribut-atribut tersebut sebenarnya tidak selalu ada hubungannya dengan faktor bawaan (jenis kelamin), hanya saja pembentukan perbedaan atribut antara laki-laki dan perempuan tersebut sudah terbentuk sangat lama sehingga sering dianggap sebagai kodrat yang berhubungan dengan jenis kelamin. Dan gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut nonbiologis.

Perbedaan gender yang dikonstruksikan secara sosial atau kultural tersebut mengakibatkan terciptanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat (Cross & Markus, 1993). Perbedaan gender sering kali menimbulkan ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan (Bem, 1981; Butler, 1990), terutama bagi kaum perempuan, padahal sebenarnya perbedaan gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut (Fakih, 2001).

Fakih (2001) menyebutkan bahwa ketidakadilan gender merupakan kondisi di mana relasi antara laki-laki dan perempuan berlangsung timpang, merugikan bahkan mengorbankan salah satu pihak. Ketidakadilan tersebut disebabkan oleh ideologi, struktur dan sistem sosial budaya yang menghendaki adanya stereotip gender yang membedakan ruang dan peran keduanya dalam berbagai bidang kehidupan. Ketidakadilan gender dimanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender (Fakih, 2001).

Subordinasi terhadap perempuan yang disebabkan oleh gender menurut pendekatan *Gender and Development* (GAD) dapat membatasi akses dan kontrol mereka terhadap berbagai sumber daya (*resources*) dan keuntungan (*benefits*). Sumber daya (*resources*) di sini bisa berupa kesempatan mendapatkan pendidikan, sumber daya ekonomis atau produktif, sumber daya politik dan waktu. Keuntungan (*benefits*) di sini bisa berupa ketersediaan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan; uang dan penghasilan; kepemilikan/kekayaan; pendidikan dan pelatihan; dan kekuasaan politik, prestise, status dan kesempatan untuk mengejar kepentingan baru (*Gender and Development Workshop: Participant Book, TT*).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan gender terjadi pada penempatan posisi dan peran sosial laki-laki dan perempuan yang berbeda dalam masyarakat, pemberian kesempatan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang sering menimbulkan subordinasi, dominasi, marginalisasi dan diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu. Berikut diuraikan secara terperinci bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan akibat diskriminasi gender.

1. Marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) perempuan

Proses marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di negara berkembang seperti pergusuran dari kampung halamannya, eksploitasi, dan lain sebagainya. Namun pemiskinan atas perempuan maupun atas laki-laki yang disebabkan karena jenis kelaminnya adalah merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender.

2. Subordinasi

Subordinasi adalah suatu keyakinan yang menganggap salah satu jenis kelamin lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsir keagamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan pada tatanan subordinat.

3. Pandangan *Stereotype*

Pelabelan atau penandaan (*stereotype*) yang sering kali bersifat negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotip yang melahirkan ketidakadilan gender dan diskriminasi bersumber dari pandangan gender karena menyangkut pelabelan atau penandaan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Misalnya, pandangan bahwa tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan atau tugas domestik, walaupun dia berada di ruang publik hanyalah sebagai “perpanjangan” peran domestiknya.

4. Kekerasan

Berbagai kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan peran muncul dalam berbagai bentuk. Kata “kekerasan” yang merupakan terjemahan dari “*violence*” artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang.

5. Beban Kerja

Sebagai suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban kerja yang harus dijalankan oleh salah satu jenis kelamin tertentu. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya, beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki dan beberapa yang lain dilakukan oleh perempuan. Hasil observasi, perempuan mengerjakan hampir 90 % pekerjaan dalam rumah tangga, sehingga apabila mereka bekerja di wilayah publik maka mereka juga mengerjakan pekerjaan domestik (*double burden*).

C. Perspektif Sensitif Gender

Penghapusan ketidakadilan gender salah satunya dapat dilakukan dengan menerapkan perspektif sensitif gender di berbagai bidang kehidupan (Callamard, 1999; Roop & Gere, 1989; Salgado, Vogt, King, & King, 2002; UNESCO, 2005). Menurut Agnes Callamard (1999) perspektif sensitif-gender ditandai dengan: pemahaman bahwa peran laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh biologis tetapi lebih dibentuk oleh sistem sosial (Callamard, 1999). Oleh karena itu peran laki-laki dan perempuan bersifat kontekstual (berbeda dari satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya, bisa berubah dari waktu ke waktu, dan bisa dipertukarkan).

1. Pemahaman bahwa definisi gender dan perannya yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki lebih ditentukan oleh struktur ekonomi, pemerintah dan proyek-proyek sosialnya, agama, budaya dan hubungan dinamis antar elemen-elemen tersebut.

2. Pemahaman bahwa perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman yang berbeda berdasarkan jenis kelaminnya. Pengalaman ini termasuk : kegiatan harian, akses dan kontrol terhadap *resources* dan *benefits*.
3. Pemahaman bahwa perempuan, sama seperti laki-laki, adalah kelompok yang heterogen. Maksudnya adalah tiap individu laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman yang berbeda berdasarkan kelas, ras, etnik, agama, status sosial dan orientasi seksualnya.
4. Pemahaman bahwa diskriminasi dan subordinasi perempuan bersifat sistemis dan dapat direfleksikan tidak hanya dalam hubungan pribadi, individual tetapi juga dalam struktur dan fungsi institusi publik, hubungan keluarga (secara *de facto* dan *de jure*), akses terhadap sumber ekonomi dan legal sistem

1. Definisi Sensitivitas Gender

Dengan menggunakan perspektif gender (Callamard, 1999), sensitivitas gender didefinisikan sebagai kualitas di mana terdapat kesadaran yang konstan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan tidak bersifat biologis, tetapi ditentukan oleh faktor lingkungan yang kompleks termasuk kondisi ekonomi, politik, sosial, agama, budaya. Kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman yang berbeda, termasuk memiliki kesempatan yang berbeda terutama dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya dan keuntungannya, dan tiap individu laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman yang heterogen yang tidak bisa disamaratakan. Serta kesadaran bahwa diskriminasi gender bersifat sistemis yang bisa termanifestasi dalam berbagai bidang kehidupan, dari struktur masyarakat terbesar sampai ke yang terkecil (Abbasi, Anwar, Habib, Khan, & Waqar, 2019).

Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, Roop & Gere (1989) dalam Mulawarman mendefinisikan sensitivitas gender sebagai suatu kualitas kesadaran bahwa dalam pendidikan laki-laki dan perempuan harus diperbolehkan untuk mengadopsi sifat dan gayanya masing-masing tanpa takut terdiskriminasi (Mulawarman & Rokhmansyah, 2018). Sedangkan Huang (2020), untuk kepentingan penelitiannya tentang gender *awareness* di bidang kesehatan, mendefinisikan sensitivitas gender sebagai suatu kualitas yang sensitif terhadap kebutuhan unik dari laki-laki dan perempuan (Huang, Liou, Lee, & Tsai, 2020).

2. Sensitivitas Gender dalam Pembangunan Manusia

Dalam penelitian ini, sensitivitas gender akan dikhususkan pada sensitivitas gender pada pembangunan manusia. Dengan menyarikan definisi-definisi sensitivitas gender yang sudah dikemukakan di atas, maka sensitivitas gender pada pembangunan manusia mencakup kualitas kesadaran manusia bahwa:

- a. Perbedaan peran, sikap dan perilaku anak laki-laki dan perempuan tidak bersifat biologis melainkan lebih dibentuk oleh harapan-harapan sosial dan budaya, sehingga dapat berubah-ubah, berbeda di satu komunitas dengan komunitas lainnya.
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan memiliki pengalaman dan persepsi yang berbeda terhadap lingkungannya dan pengalaman dan persepsi tersebut bersifat heterogen baik untuk laki-laki maupun perempuan.
- c. Bahwa masing-masing anak laki-laki dan perempuan memiliki sifat, karakter, perilaku dan kebutuhan yang unik, tetapi keunikannya tidak boleh digunakan untuk membandingkan keduanya. Terutama tidak untuk menentukan secara sepihak yang mana yang baik untuk laki-laki dan yang mana yang baik untuk perempuan.

3. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah seperti sebuah frasa (istilah) “suci” yang sering diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan hampir oleh para pejabat negara. Istilah kesetaraan gender dalam tataran praksis, hampir selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh para perempuan. Maka istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, seperti subordinasi, penindasan, kekerasan, dan sebagainya. Persoalan perempuan berkaitan dengan masalah kesetaraan gender ini memang dapat mengundang rasa simpati yang cukup besar dari masyarakat luas. Hal ini terjadi karena permasalahan kesetaraan gender sering dianggap erat kaitannya dengan persoalan keadilan sosial dalam arti yang lebih luas.

Konsep kesetaraan gender ini memang merupakan suatu konsep yang sangat rumit dan mengundang kontroversi. Hingga saat ini belum ada konsensus mengenai pengertian dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan hak dan kewajiban, yang tentunya masih belum jelas. Kemudian ada pula yang mengartikannya dengan konsep mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, yang juga masih belum jelas artinya. Sering juga diartikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam melakukan aktualisasi diri, namun harus sesuai dengan kodratnya masing-masing.

Kesetaraan gender dapat juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Secara umum para Feminisme menginginkan kesetaraan gender yang sama rata antara laki-laki dan perempuan dari segala aspek kehidupan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Pada umumnya orang berprasangka bahwa Feminisme merupakan gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki dalam upaya melawan pranata sosial yang ada, misalnya institusi rumah tangga, perkawinan maupun usaha pemberontakan perempuan untuk mengingkari kodratnya. Dengan kesalahpahaman seperti ini, maka feminisme tidak saja kurang mendapat tempat di kalangan kaum perempuan sendiri, bahkan secara umum tidak ditolak oleh masyarakat.

Feminisme sebenarnya berasal dari kata *feminis* yang berarti memiliki sifat keperempuanan. Feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini, timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyeteraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang sesuai dengan potensi masing-masing sebagai manusia (*human being*). Operasionalisasi upaya pembebasan diri kaum perempuan dari berbagai ketimpangan perlakuan dalam segala aspek kehidupan disebut gerakan feminis.

Hakikat Feminisme adalah gerakan transformasi sosial, dalam arti tidak selalu hanya memperjuangkan masalah perempuan belaka. Dengan demikian strategi perjuangan gerakan feminisme dalam jangka panjang tidak sekedar upaya pemenuhan kebutuhan

praktis kondisi kaum perempuan saja atau hanya dalam rangka mengakhiri dominasi gender dan manifestasinya, seperti eksploitasi, marginalisasi, subordinasi, pelekatan stereotip, kekerasan dan penjinakan belaka, melainkan perjuangan transformasi sosial ke arah penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Samarinda dengan lokasi penelitian pada Instansi Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Samarinda. Setiap OPD digali terkait data pilah gender yang berkenaan dengan sumber daya manusia, kebijakan/program atau kegiatan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia berbasis gender.

B. Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan data sekunder akan diperoleh dari kantor statistik dan dinas instansi terkait yang meliputi :

1. Sensus penduduk
2. Survei penduduk antar sensus (Supas)
3. Survei Ekonomi dan Angkatan Kerja Nasional (Sakemas)
4. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
5. Indikator Sosial Perempuan
6. Organisasi Perempuan
7. Instansi pemerintah, seperti Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Depag, Pengadilan Agama dan Bappeda.
8. Tokoh perempuan Kota Samarinda. Sumber data sekunder lainnya dari Dinas/Instansi Pemerintah Sipil maupun TNI/Polri berdasarkan pedoman penyusunan yang sudah ditentukan dalam SK Menteri Negara Urusan Perempuan Nomor 06 Tahun 1995.

C. Data yang Diperlukan

Data yang dihimpun dalam menulis buku *Profil Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2021* meliputi data pilah bidang kependudukan/demografi, sosial budaya, ekonomi, hukum dan keamanan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan politik.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan buku *Profil Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2021* sebagai berikut.

1. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Metode dokumentasi untuk memperoleh data primer yang berupa data kuantitatif dari ketiga variabel penelitian.
2. Wawancara untuk memperoleh data kualitatif mengenai faktor-faktor penyebab kesenjangan gender (Musoke, Ssemugabo, Ndejjo, Ekirapa-Kiracho, & George, 2018).

E. Teknik Analisis Data

Analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang status laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan dan faktor yang mempengaruhi berdasarkan akses, peran, kontrol dan manfaat. Analisis gender bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender, mengidentifikasi

kesenjangan gender dari aspek peran, akses, kontrol dan manfaat, menghimpun masalah-masalah kesenjangan gender dan upaya pemecahannya serta mengidentifikasi langkah-langkah intervensi tindakan yang diperlukan.

Dalam analisis data digunakan metode analisis berperspektif gender dengan menerapkan *Gender Analysis Pathways* (GAP) (Frank, 2019). *Gender Analysis Pathway* (GAP) merupakan suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai isu kebijakan dalam hal ini isu kebijakan pembangunan dengan melihat pada berbagai aspek permasalahan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil analisis, kemudian dilakukan kembali berbagai alternatif kebijaksanaan pendidikan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang responsif gender. Setelah data dianalisis menggunakan GAP, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis perencanaan yang dikenal dengan istilah *Policy Outlook and Action Plan* (POP) dalam rangka merumuskan berbagai kebijaksanaan secara lebih konkret termasuk rencana kegiatan di masing-masing program pendidikan.

GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam merencanakan kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan (Gauvin et al., 2020). Dengan menggunakan GAP para perencana kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana, kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut. GAP dibuat dengan menggunakan metodologi yang sangat sederhana agar mudah dipahami oleh para perencana. Terdapat 3 tahapan dalam menganalisis dengan metode tersebut yang masing-masing memiliki langkah dalam kegiatan analisis, yakni: (1) Menyajikan data dalam bentuk data pilah, (2) Menentukan isu gender dengan mencermati adanya kesenjangan gender, dan (3) Menentukan penyebab kesenjangan gender dengan empat indikator yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM).

BAB IV DATA PILAH GENDER DAN ANAK KOTA SAMARINDA TAHUN 2021

Data terpilah adalah data berdasarkan jenis kelamin (*sex-disaggregated data*) berupa data kuantitatif atau data kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Data ini selanjutnya menjadi bahan dasar bagi OPD dan instansi vertikal dalam merencanakan kegiatan atau program yang responsif gender. Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, kesehatan, dan lain-lain.

A. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Proses pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kondisi penduduk di suatu wilayah. Penduduk merupakan subjek pembangunan sekaligus objek dalam pembangunan yang menentukan kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Oleh karena itu sebelum kita menentukan program pembangunan kita harus mengetahui kondisi dan situasi penduduk terlebih dahulu yang meliputi jumlah, jenis kelamin, kelompok usia dan sebagainya. Berikut ini akan diuraikan kondisi penduduk di kota Samarinda yang akan dirinci berdasarkan jenis kelamin per kecamatan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda Tahun 2020

No	Kecamatan	Nama Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total
I	Palaran		31.806	29.794	61.600
1		Bantuas	11.467	10.834	22.301
2		Bukuan	4.964	4.606	9.570
3		Handil Bakti	8.758	8.083	16.841
4		Rawa Makmur	4.365	4.090	8.455
5		Simpang Pasir	2.252	2.181	4.433
II	Samarinda Seberang		32.531	31.081	63.612
1		Baqa	8.721	8.164	16.885
2		Gunung Panjang	7.226	7.095	14.321
3		Mangkupalas	6.914	6.643	13.557
4		Mesjid	4.690	4.475	9.165
5		Sungai Keledang	3.171	3.049	6.220
6		Tenun Samarinda	1.809	1.655	3.464
III	Samarinda Ulu		66.327	64.630	130.957
1		Air Hitam	6.938	6.648	13.586
2		Air Putih	6.009	5.727	11.736
3		Bukit Pinang	14.404	14.272	28.676
4		Dadimulya	12.623	12.244	24.867
5		Gunung Kelua	7.807	7.837	15.644
6		Jawa	6.283	6.070	12.353
7		Sidodadi	6.658	6.564	13.222
8		Teluk Lerong Ilir	5.605	5.268	10.873
IV	Samarinda Ilir		35.661	34.291	69.952
1		Pelita	6.627	6.323	12.950
2		Selili	4.904	4.691	9.595

3		Sidodamai	8.643	8.380	17.023
4		Sidomulyo	7.152	6.700	13.852
5		Sungai Dama	8.335	8.197	16.532
V	Samarinda Utara		52.137	50.123	102.260
1		Budaya Pampang	7.931	7.651	15.582
2		Lempake	10.368	9.958	20.326
3		Sempaja Barat	2.365	2.200	4.565
4		Sempaja Selatan	10.857	10.512	21.369
5		Sempaja Timur	5.342	5.037	10.379
6		Sempaja Utara	2.641	2.526	5.167
7		Sungai Siring	11.857	11.548	23.405
8		Tanah Merah	776	691	1.467
VI	Sungai Kunjang		66.037	63.791	129.828
1		Karang Anyar	14.973	14.522	29.495
2		Karang Asam Ilir	4.198	4.030	8.228
3		Karang Asam Ulu	8.806	8.450	17.256
4		Loa Bakung	14.518	14.078	28.596
5		Loa Buah	7.324	7.162	14.486
6		Lok Bahu	7.619	7.301	14.920
7		Telok Lerong Ulu	8.599	8.248	16.847
VII	Sambutan		28.646	27.379	56.025
1		Makroman	7.212	6.848	14.060
2		Pulau Atas	13.089	12.516	25.605
3		Sambutan	4.723	4.488	9.211
4		Sindang Sari	1.929	1.927	3.856
5		Sungai Kapih	1.693	1.600	3.293
VIII	Sungai Pinang		53.276	51.815	105.091
1		Bandara	8.721	8.526	17.247
2		Gunung Lingai	23.350	22.986	46.336
3		Mugirejo	5.577	5.340	10.917
4		Sungai Pinang Dalam	11.398	10.952	22.350
5		Temindung Permai	4.230	4.011	8.241
IX	Samarinda Kota		16.692	16.485	33.177
1		Bugis	3.056	3.021	6.077
2		Karang Mumus	3.282	3.256	6.538
3		Pasar Pagi	1.789	1.838	3.627
4		Pelabuhan	2.431	2.349	4.780
5		Sungai Pinang Luar	6.134	6.021	12.155
X	Loa Janan Ilir		33.069	31.683	64.752
1		Harapan Baru	6.344	6.054	12.398
2		Rapak Dalam	4.321	4.083	8.404
3		Sengkotek	3.838	3.634	7.472
4		Simpang Tiga	8.297	8.028	16.325
5		Tani Aman	10.269	9.884	20.153
Total			416.182	401.072	817.254

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2020.

Berdasarkan sumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Samarinda pada tahun 2020 sebanyak 817.254 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki 416.182 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 401.072 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kota Samarinda. Kondisi penduduk di tiap-tiap kecamatan jumlah berbeda-beda sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Kecamatan Palaran yang terdiri atas 5 desa memiliki jumlah penduduk 61.600 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 31.806 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 29.794 jiwa. Berdasarkan jumlah kelamin, penduduk laki-laki lebih tinggi dari pada penduduk perempuan. Selanjutnya untuk Kecamatan Samarinda Seberang yang

meliputi 6 desa/kelurahan jumlah keseluruhan penduduk laki-laki dan perempuan sebanyak 63.612 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 32.531 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 31.081 jiwa. Tidak berbeda dengan kecamatan yang lain di Kecamatan Samarinda Seberang juga memiliki penduduk laki-laki yang lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Penduduk di Kecamatan Samarinda Ulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 130.957 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 66.327 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 64.630 jiwa. Sebagaimana kecamatan lain di Kecamatan Samarinda ulu yang memiliki 8 desa/kelurahan penduduk laki-laki juga lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Kecamatan Samarinda Ilir yang meliputi 6 desa/kelurahan jumlah penduduknya sebanyak 69.952 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki 35.661 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 34.291 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk di Kecamatan Samarinda Utara sebanyak 102.260 jiwa yang tersebar di 8 desa/kelurahan. Jika dilihat dari jenis kelamin jumlah tersebut terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 52.137 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 50.123 jiwa. Di Kecamatan Sungai Kunjang dengan 7 desa/kelurahan memiliki jumlah penduduk 129.828 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 66.037 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 63.791 jiwa. Selanjutnya untuk Kecamatan Sambutan dengan jumlah 5 desa/kelurahan sebanyak memiliki penduduk sebanyak 56.025 jiwa yang terdiri atas 28.646 penduduk laki-laki dan perempuan sebanyak 27.379 jiwa. Untuk Kecamatan Sungai Pinang yang memiliki wilayah 5 desa/kelurahan total penduduk sebanyak 105.091 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 53.277 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 51.815 jiwa. Selanjutnya untuk Samarinda Kota yang meliputi 5 desa/kelurahan jumlah penduduknya berjumlah 33.177 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 16.692 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 16.485 jiwa. Dan Kecamatan Loa Janan Ilir dengan jumlah 5 desa/kelurahan memiliki jumlah penduduk sebanyak 64.752 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 33.069 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 31.684 jiwa.

Berdasarkan rincian yang tertera pada Tabel 1 tersebut penduduk Kota Samarinda secara total berjumlah 817.254 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki 416.182 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 401.072 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan namun jumlahnya tidak banyak selisihnya. Apabila dilihat persentasenya adalah 50.92% untuk penduduk laki-laki dan 49.08% penduduk perempuan.

2. Jumlah Kepala Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga. Dalam sebuah ikatan perkawinan layaknya ada seorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga. Namun dalam perkembangannya kepala keluarga bukan hanya diperankan oleh suami (laki-laki) karena kondisi tertentu. Seorang perempuan pun dapat berperan sebagai kepala keluarga. Walaupun perempuan dapat berperan sebagai kepala keluarga umumnya lebih banyak didominasi oleh laki-laki seperti yang terlihat di Kota Samarinda pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda Tahun 2020

No	Kecamatan	Nama Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total
I	Palaran		17.014	3.136	20.150
1		Bantuas	1.226	257	1.483
2		Bukuan	4.778	938	5.716
3		Handil Bakti	2.641	528	3.169
4		Rawa Makmur	6.053	1.039	7.092
5		Simpang Pasir	2.316	374	2.690
II	Samarinda Seberang		16.609	4.179	20.788
1		Baqa	3.761	998	4.759
2		Gunung Panjang	973	192	1.165
3		Mangkupalas	2.340	613	2.953
4		Mesjid	3.505	952	4.457
5		Sungai Keledang	4.490	992	5.482
6		Tenun Samarinda	1.540	432	1.972
III	Samarinda Ulu		34.687	8.681	43.368
1		Air Hitam	3.965	1.023	4.988
2		Air Putih	7.417	1.790	9.207
3		Bukit Pinang	2.817	557	3.374
4		Dadimulya	3.399	799	4.198
5		Gunung Kelua	3.522	868	4.390
6		Jawa	3.153	927	4.080
7		Sidodadi	6.710	1.631	8.341
8		Teluk Lerong Ilir	3.704	1.086	4.790
IV	Samarinda Ilir		18.055	4.888	22.943
1		Pelita	4.195	1.183	5.378
2		Selili	3.421	857	4.278
3		Sidodamai	3.560	910	4.470
4		Sidomulyo	4.437	1.161	5.598
5		Sungai Dama	2.442	777	3.219
V	Samarinda Utara		26.854	5.427	32.281
1		Budaya Pampang	363	70	433
2		Lempake	5.446	1.002	6.448
3		Sempaja Barat	1.348	284	1.632
4		Sempaja Selatan	4.124	967	5.091
5		Sempaja Timur	5.936	1.153	7.089
6		Sempaja Utara	5.580	1.186	6.766
7		Sungai Siring	1.247	255	1.502
8		Tanah Merah	2.810	510	3.320
VI	Sungai Kunjang		34.129	7.940	42.069
1		Karang Anyar	4.467	1.204	5.671
2		Karang Asam Ilir	3.857	1.104	4.961
3		Karang Asam Ulu	4.680	1.070	5.750
4		Loa Bakung	7.747	1.617	9.364
5		Loa Buah	2.242	489	2.731
6		Lok Bahu	7.395	1.397	8.792
7		Telok Lerong Ulu	3.741	1.059	4.800
VII	Sambutan		14.565	2.951	17.516
1		Makroman	2.492	506	2.998
2		Pulau Atas	863	201	1.064
3		Sambutan	6.483	1.366	7.849
4		Sindang Sari	1.037	194	1.231
5		Sungai Kapih	3.690	684	4.374
VIII	Sungai Pinang		27.483	6.818	34.301
1		Bandara	4.505	1.234	5.739
2		Gunung Lingai	12.051	3.151	15.202
3		Mugirejo	2.853	632	3.485

4		Sungai Pinang Dalam	5.819	1.200	7.019
5		Temindung Permai	2.255	601	2.856
IX	Samarinda Kota		8.743	2.678	11.421
1		Bugis	1.340	356	1.696
2		Karang Mumus	1.548	524	2.072
3		Pasar Pagi	943	322	1.265
4		Pelabuhan	1.766	543	2.309
5		Sungai Pinang Luar	3.146	933	4.079
X	Loa Janan Ilir		17.405	3.990	21.395
1		Harapan Baru	4.325	1.018	5.343
2		Rapak Dalam	5.136	1.147	6.283
3		Sengkotek	2.181	569	2.750
4		Simpang Tiga	3.508	848	4.356
5		Tani Aman	2.255	408	2.663
Total			215.544	50.688	266.232

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2020.

Berdasarkan data dari Disdukcapil tahun 2020 kelapa keluarga di Kota Samarinda berjumlah 266.232 keluarga. Dari jumlah tersebut sebanyak 215.544 adalah Kepala Keluarga laki-laki (80.96%) sedangkan sebanyak 50.688 (19.04%) adalah Kepala Keluarga perempuan. Di sini peran kepala keluarga lebih banyak diperankan oleh laki-laki dan kondisi tersebut juga terjadi di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Samarinda.

Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Palaran yang terdiri atas 5 desa/kelurahan sebanyak 20.150 KK dengan rincian 17.014 adalah Kepala Keluarga laki-laki dan 3.136 KK adalah Kepala Keluarga perempuan. Untuk Kecamatan Samarinda Seberang terdapat 20.788 KK yang terdiri atas 16.609 Kepala Keluarga laki-laki dan 4.179 adalah KK perempuan. Dominasi Kepala Keluarga laki-laki juga terjadi di kecamatan Samarinda Ulu yang secara total sebanyak 43.368 adalah Kepala Keluarga dengan rincian 34.687 adalah Kepala Keluarga laki-laki dan 8.681 adalah Kepala Keluarga perempuan. Demikian juga di Kecamatan Samarinda Ilir yang secara keseluruhan berjumlah 22.943 KK yang terdiri atas 18.055 adalah Kepala Keluarga laki-laki dan 4.888 KK adalah Kepala Keluarga perempuan. Untuk Kecamatan Samarinda Utara jumlah KK sebanyak 32.281 Kepala Keluarga dengan rincian 26.854 Kepala keluarga laki-laki dan 5.427 Kepala Keluarga perempuan. Sedangkan Kecamatan Sungai Kunjang jumlah Kepala Keluarga sebanyak 42.069 yang terdiri atas 34.129 kepala Keluarga laki-laki dan Kepala Keluarga perempuan sebanyak 7.940 KK.. Di Kecamatan Sambutan jumlah KK sebanyak 17.516 yang terbagi atas 14.565 Kepala Keluarga laki-laki dan Kepala Keluarga perempuan sebanyak 2.951 KK. Kecamatan Sungai Pinang secara keseluruhan jumlah KK sebanyak 34.301 dengan rincian kepala Keluarga laki-laki sebanyak 27.483 dan 6.818 adalah Kepala Keluarga perempuan. Di Kecamatan Samarinda dengan Jumlah KK sebanyak 11.421 terdiri atas 8.743 Kepala Keluarga laki-laki dan 2.678 Kepala Keluarga perempuan. Untuk Kecamatan Samarinda Ilir jumlah KK sebanyak 21.395 dengan rincian 17.405 Kepala Keluarga laki-laki dan 3.990 adalah Kepala Keluarga perempuan.

3. Jumlah Rukun Tetangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan. Pembentukannya Rukun Tetangga adalah dengan cara musyawarah masyarakat. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau Kepala Keluarga (KK). Dalam pemilihan Ketua Rukun Tetangga dapat diikuti oleh warga

masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin. Namun pada umumnya Ketua RT lebih banyak dipegang oleh penduduk laki-laki. Gambaran Ketua RT di Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Jumlah Rukun Tetangga Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda Tahun 2020

No	Kecamatan	Nama Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total
I	Palaran		163	7	170
1		Bantuas	13	1	14
2		Bukuan	43	4	47
3		Handil Bakti	31	1	32
4		Rawa Makmur	51	1	52
5		Simpang Pasir	25	0	25
II	Samarinda Seberang		107	12	119
1		Baqa	20	2	22
2		Gunung Panjang	7	1	8
3		Mangkupalas	18	1	19
4		Mesjid	17	4	21
5		Sungai Keledang	33	3	36
6		Tenun Samarinda	12	1	13
III	Samarinda Ulu		296	28	324
1		Air Hitam	34	1	35
2		Air Putih	55	5	60
3		Bukit Pinang	19	2	21
4		Dadimulya	36	4	40
5		Gunung Kelua	36	2	38
6		Jawa	34	6	40
7		Sidodadi	56	4	60
8		Teluk Lerong Ilir	26	4	30
IV	Samarinda Ilir		174	14	188
1		Pelita	38	8	46
2		Selili	35	2	37
3		Sidodamai	31	0	31
4		Sidomulyo	39	2	41
5		Sungai Dama	31	2	33
V	Samarinda Utara		230	7	237
1		Budaya Pampang	5	1	6
2		Lempake	47	1	48
3		Sempaja Barat	12	0	12
4		Sempaja Selatan	30	3	33
5		Sempaja Timur	51	0	51
6		Sempaja Utara	42	1	43
7		Sungai Siring	12	1	13
8		Tanah Merah	31	0	31
VI	Sungai Kunjang		0	0	0
1		Karang Anyar	0	0	0
2		Karang Asam Ilir	0	0	0
3		Karang Asam Ulu	0	0	0
4		Loa Bakung	0	0	0
5		Loa Buah	0	0	0
6		Lok Bahu	0	0	0
7		Telok Lerong Ulu	0	0	0
VII	Sambutan		105	6	111
1		Makroman	27	0	27

2		Pulau Atas	9	0	9
3		Sambutan	38	2	40
4		Sindang Sari	10	0	10
5		Sungai Kapih	21	4	25
VIII	Sungai Pinang		217	21	238
1		Bandara	26	3	29
2		Gunung Lingai	22	1	23
3		Mugirejo	40	3	43
4		Sungai Pinang Dalam	95	9	104
5		Temindung Permai	34	5	39
IX	Samarinda Kota		125	22	147
1		Bugis	18	1	19
2		Karang Mumus	28	1	29
3		Pasar Pagi	19	5	24
4		Pelabuhan	28	10	38
5		Sungai Pinang Luar	32	5	37
X	Loa Janan Ilir		126	16	142
1		Harapan Baru	38	5	43
2		Rapak Dalam	27	2	29
3		Sengkotek	15	5	20
4		Simpang Tiga	27	3	30
5		Tani Aman	19	1	20
Total			1.543	133	1.656

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2020.

Berdasarkan data dari Disdukcapil Tahun 2020 jumlah Ketua RT di Kota Samarinda yang terdiri atas 10 wilayah kecamatan, data yang tersedia hanya 9 kecamatan karena ada satu kecamatan yakni Kecamatan Sungai Kunjang tidak tersedia datanya. Dari 9 wilayah kecamatan jumlah Ketua RT sebanyak 1.656 orang. Jumlah tersebut terdiri atas Ketua RT laki-laki sebanyak 1.543 orang dan Ketua RT perempuan sebanyak 133 orang. Apa bila dilihat dari kaca mata gender tampak bahwa perempuan yang menjabat sebagai Ketua RT sangat tertinggal dibanding laki-laki. Hal ini terjadi di semua wilayah kecamatan padahal jika mengacu pada jumlah penduduk di Kota Samarinda jumlah penduduk laki-laki dan perempuan memiliki jumlah yang seimbang.

Apabila dilihat dari jenis kelamin jumlah Ketua RT perempuan yang terbanyak di Kecamatan Samarinda Ulu dengan jumlah 28 orang. Hal ini sangat relevan dengan keseluruhan jumlah penduduk tertinggi untuk Kota Samarinda berada di Kecamatan Samarinda Ulu. Hal senada juga terjadi di Kecamatan Sambutan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit maka jumlah Ketua RT perempuan pun juga sangat sedikit yakni hanya 6 orang.

B. Kesehatan

1. Tenaga Kesehatan di Sarana Layanan Kesehatan

Dalam Undang-undang (UU) tentang Tenaga Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2014) disebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki beberapa petugas yang dalam kerjanya saling berkaitan yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan ketenagaan medis lainnya (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996). Tenaga kesehatan di sarana layanan kesehatan berperan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan di wilayah masing-masing. Tenaga kesehatan sebagai salah satu unsur di masyarakat dan pemerintahan amat

dibutuhkan perannya untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Untuk itu banyaknya tenaga kesehatan di suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap masalah kesehatan. Banyaknya tenaga kesehatan di Kota Samarinda berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Jumlah Tenaga Kesehatan di Sarana Layanan Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2020

No	Jenis Pendidikan	Satuan	L	P	Total
1	Dokter Spesialis	Orang	154	95	249
2	Dokter Umum	Orang	218	441	659
3	Dokter Gigi Spesialis	Orang	7	9	16
4	Dokter Gigi	Orang	23	75	98
5	Bidan	Orang	0	729	729
6	Perawat	Orang	787	1934	2721
7	Tenaga Kefarmasian	Orang	140	351	491
8	Tenaga Kesmas	Orang	43	88	131
9	Tenaga Kesling	Orang	35	53	88
10	Tenaga Ahli Kesehatan	Orang	123	210	333
11	Tenaga Gizi /Nutrisionis	Orang	10	73	83
12	Keterapian Fisik	Orang	26	32	58
13	Keteknisian Medis	Orang	39	42	81
Jumlah		Orang	1605	4132	5737

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2020.

Jumlah tenaga kesehatan yang terdaftar pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebanyak 5737 orang yang dibagi berdasarkan jenis pendidikan dari dokter spesialis sampai keteknisian medis. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin jumlah tenaga kesehatan secara total perempuan lebih tinggi daripada tenaga kesehatan laki-laki. Hal ini layak terjadi bahwa di sektor pelayanan umumnya perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

Berdasarkan jenis keterampilan medis perempuan lebih mendominasi seperti yang terlihat pada tenaga kebidanan mutlak 100% adalah perempuan. Kemudian disusul tenaga keperawatan yang secara total berjumlah 2721 orang itu perawat perempuan sebanyak 1934 orang dan perawat laki-laki sebanyak 787 orang. Demikian juga tenaga kefarmasian juga dari jumlah 491 orang, laki-laki hanya 140 sedangkan perempuan sebanyak 351 orang. Namun jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan seperti pada dokter spesialis yang secara keseluruhan berjumlah 249 orang didominasi laki-laki sebanyak 154 orang dan perempuan 95 orang.

2. Posyandu dan Posbindu PTM

Departemen Kesehatan RI. 2006 mendefinisikan posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait. Posyandu merupakan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Fungsi posyandu adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan balita.

Berdasarkan perkembangannya posyandu dibagi menjadi 4 strata, yaitu posyandu strata pratama yang jumlah kadernya kurang dari lima orang, pelaksanaan kegiatannya

belum dapat berjalan secara rutin. Posyandu madya adalah posyandu yang jumlah kadernya sudah lebih dari 5 orang dan dapat melaksanakan kegiatan lebih dari delapan kali dalam tiap tahun dengan kegiatan yang mencakup lima aktivitas Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare. Posyandu madya cakupan kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50%. Sedangkan posyandu Purnama adalah posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu. Posyandu Mandiri adalah posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dan kelompok usaha bersama (usaha dikelola oleh masyarakat) yang dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu. Berdasarkan stratanya jumlah posyandu yang ada di kota Samarinda tertera dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kota Samarinda Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Strata Posyandu									Posyandu Aktif		Jumlah Posyandu PTM
			Pratama		Madya		Purnama		Mandiri		Total	Jml	%	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%				
I Palaran														
1		Palaran	8	29,63	14	51,9	5	18,5	0	0	27	5	18,5	3
2		Bantuan	0	0	5	100	0	0	0	0	5	0	0	2
3		Bukuan	0	0	2	16,7	10	83,3	0	0	12	10	83,3	4
II Samarinda Seberang														
1		Mangkupalas	0	0	29	100	0	0	0	0	29	0	0	4
2		Baqa	1	3,8	19	73,1	3	11,5	3	11,5	26	6	23,1	6
III ILoa Janan Ilir														
1		Harapan Baru	5	21,7	17	73,9	0	0	1	4,3	23	1	4,3	2
2		Trauma Center	11	39,3	16	57,1	1	3,6	0	0	28	1	3,6	3
IV Sungai Kunjang														
1		Loa Bakung	11	52,4	10	47,6	0	0	0	0	21	0	0	2
2		Karang Asam	0	0	19	79,2	3	12,5	2	8,3	24	5	20,8	0
3		Lok Bahu	7	35	7	35	6	30	0	0	20	6	30	1
4		Wonorejo	0	0	12	29,3	27	65,9	2	4,9	41	29	70,7	2
V Samarinda Ulu														
1		Juanda	7	24,1	10	34,5	8	27,6	4	13,8	29	12	41,4	0
2		Air Putih	9	39,1	2	8,7	9	39,1	3	13	23	12	52,2	2
3		Segiri	13	48,1	7	25,9	4	14,8	3	11,1	27	7	25,9	2
4		Pasundan	0	0	9	26,5	25	73,5	0	0	34	25	73,5	4
VI Samarinda Kota														
1		Samarinda Kota	0	0	34	100	0	0	0	0	34	0	0	8
VII Samarinda Ilir														
1		Sidomulyo	28	50	28	50	0	0	0	0	56	0	0	8
VIII Sambutan														
1		Sungai Kapih	1	7,1	13	92,9	0	0	0	0	14	0	0	3
2		Sambutan	3	14,3	14	66,7	4	19	0	0	21	4	19	2
3		Makroman	1	6,7	14	93,3	0	0	0	0	15	0	0	5
IX Samarinda Utara														
1		Bengkuring	1	3	15	45,5	0	0	17	51,5	33	17	51,5	4
2		Sempaja	0	0	17	100	0	0	0	0	17	0	0	3
3		Sungai Siring	0	0	21	100	0	0	0	0	21	0	0	3
4		Lempake	1	0,043	22	95,7	0	0	0	0	23	0	0	6
X Sungai Pinang														
1		Remaja	6	21,4	22	78,6	0	0	0	0	28	0	0	12
2		Temindung	8	25	17	53,1	4	12,5	3	9,4	32	7	21,9	0

Total Posyandu Kota Samarinda	121	18,3	395	59,6	109	16,4	38	5,7	663	147	22,2	89
-------------------------------	-----	------	-----	------	-----	------	----	-----	-----	-----	------	----

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2020.

Jumlah posyandu pratama di kota Samarinda pada tahun 2020 sebanyak 121 posyandu dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Samarinda Ulu dan Samarinda Ilir sebanyak 28 posyandu. Sedangkan di Kecamatan Kota dan Kecamatan Palaran jumlah posyandu pratama sudah tidak ada sama sekali. Untuk posyandu madya sebanyak 395 yang tersebar di 10 kecamatan dengan jumlah terbanyak adalah di Kecamatan Samarinda Utara dengan jumlah 75 posyandu yang tersebar di empat desa/kelurahan Bengkuring, Sempaja, Sungai Siring, dan Lempake. Adapun jumlah posyandu madya paling rendah terdapat di Kecamatan Palaran sebanyak 21 posyandu madya. Jumlah posyandu purnama di Kota Samarinda berjumlah 109 posyandu dengan jumlah tertinggi terdapat di Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 46 posyandu kemudian Kecamatan Sungai Kunjang sebanyak 36 posyandu purnama. Starta posyandu paling tinggi adalah posyandu mandiri. Di Kota Samarinda sudah memiliki posyandu mandiri sebanyak 38 posyandu dengan jumlah tertinggi berada di Kecamatan Samarinda Utara dengan jumlah 17 posyandu namun di beberapa kecamatan masih ada yang belum memiliki posyandu mandiri di antaranya di Kecamatan Palaran, Samarinda Kota, Samarinda Ilir, dan Kecamatan Sambutan.

3. Kematian Ibu Maternal Menurut Sebab Penyakitnya dan Kelahiran Bayi

Menurut WHO yang dimaksud dengan kematian maternal adalah kematian seorang wanita hamil atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan oleh sebab apa pun, terlepas dari tuanya kehamilan dan tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan. Penyebab kematian ini dapat dibagi dalam 2 golongan yakni kematian yang langsung disebabkan oleh komplikasi- komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, dan sebab yang lain seperti penyakit jantung, kanker dan sebagainya.

Tabel 6. Jumlah Kematian Ibu Maternal Menurut Sebab Penyakitnya Kota Samarinda Tahun 2020

No.	Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM)	Jumlah Kematian Ibu	Sebab Kematian Ibu					Jumlah PKM Melaksanakan AMP
			Pendarahan	Hipertensi dalam Kehamilan	Gangguan Sistem Peredaran Darah (Jantung, Stroke, dll)	Gangguan Metabolik	Lain-Lain	
1	Palaran							1
2	Bantuas							
3	Bukuan							
4	Mangkupalas	1					1	
5	Baka							
6	Trauma Center	1			1			
7	Harapan Baru							
8	Loa Bakung							
9	Karang Asam	1					1	2
10	Lok Bahu	1					1	2
11	Wonorejo							1
12	Air Putih							1
13	Juanda	2	1				1	
14	Segiri							
15	Pasundan							
16	Samarinda Kota							
17	Sidomulyo	1					1	

18	Sei Kapih						
19	Makroman						
20	Sambutan						
21	Bengkuring						
22	Sempaja						
23	Sei Siring	3	2	1			
24	Lempake						
25	Remaja						
26	Temindung						
Jumlah		10	3	1	1	5	7

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2020.

Tabel 7. Jumlah Kelahiran Bayi Kota Samarinda Tahun 2020

No.	Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM)	Jumlah Bayi Lahir Hidup			Jumlah Bayi Lahir Mati		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Palaran	380	367	747	2	1	3
2	Bantuas	39	43	82			
3	Bukuan	177	156	333			
4	Mangkupalas	214	251	465			
5	Baka	418	406	824			
6	Trauma Center	246	242	488		1	1
7	Harapan Baru	325	318	643		1	1
8	Loa Bakung	215	231	446	1	1	2
9	Karang Asam	248	184	432			
10	Lok Bahu	270	294	564	1	1	2
11	Wonorejo	312	294	606			
12	Air Putih	388	366	754		1	1
13	Juanda	242	213	455			
14	Segiri	366	346	712			
15	Pasundan	254	232	486			
16	Samarinda Kota	337	333	670			
17	Sidomulyo	463	458	921			
18	Sei Kapih	119	111	230			
19	Makroman	159	140	299	1	2	3
20	Sambutan	238	284	522	1		1
21	Bengkuring	355	335	690			
22	Sempaja	210	196	406			
23	Sei Siring	127	113	240			
24	Lempake	0	0	0		1	1
25	Remaja	275	259	534			
26	Temindung	741	701	1.442	1		1
Jumlah		7.118	6.873	13.991	7	9	16

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2020.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda pada tahun 2020 jumlah kematian ibu maternal sebanyak 10 orang. Adapun penyebab kematian ibu maternal tersebut disebabkan karena pendarahan, 3 orang, hipertensi dalam kehamilan 1 orang, gangguan sistem peredaran darah sebanyak 1 orang dan yang disebabkan kasus yang lain sebanyak 5 orang. Jumlah kematian ibu maternal terbanyak adalah terjadi di Puskesmas Sungai Siring dan puskesmas Juanda 2 orang. Pada tahun yang sama di Kota Samarinda terdapat bayi lahir hidup sebanyak 13.991 anak yang terdiri atas bayi laki-laki sebanyak 7.118 anak dan bayi perempuan sebanyak 6.873 anak. Untuk jumlah kematian

bayi saat lahir sebanyak 16 anak dengan rincian bayi laki-laki sebanyak 7 orang dan bayi perempuan sebanyak 9 orang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah kematian bayi sebanyak 16 jiwa dari jumlah kelahiran bayi hidup 13.991 anak (1.14 per 1000KH). Apabila dirinci berdasarkan jenis kelamannya maka jumlah kematian bayi laki-laki sebanyak 7 jiwa dari jumlah kelahiran bayi hidup sebanyak 7.118 anak (0.84 per 1000KH) dan jumlah kematian bayi perempuan adalah 9 jiwa dari jumlah bayi lahir 6.873 anak (1.30 per 1000KH).

4. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4

Pengertian istilah K1 dan K4 adalah waktu pemeriksaan ibu hamil selama masa kehamilan. Kunjungan ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya adalah sebanyak empat kali yang dikenal dengan istilah K1, K2, K3, dan K4. Satu kali pada triwulan pertama yaitu masa hamil sebelum 14 minggu, satu kali pada triwulan kedua waktunya antara masa kehamilan 14—28 minggu, dan dua kali pada triwulan ketiga yang waktunya antara minggu ke-28 s.d. ke-36 dan sesudah minggu ke-36. Ibu hamil memerlukan sedikitnya empat kali kunjungan selama periode masa kehamilan. Kadang-kadang tidak semua ibu hamil memperhatikan pemeriksaan sesuai anjuran dari Kemenkes. Berikut adalah data cakupan kunjungan ibu hamil K1 dan K4 Kota Samarinda.

Tabel 8. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 Kota Samarinda Tahun 2020

No	Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil	Kunjungan K1		Kunjungan K4	
			ABS	(%)	ABS	(%)
1	Palaran	860	740	86,06	740	86,06
2	Bantuas	96	87	90,17	72	74,62
3	Bukuan	376	328	87,3	283	75,32
4	Mangkupalas	639	438	68,54	386	60,4
5	Baka	756	860	113,76	632	83,6
6	Trauma Center	620	504	81,3	402	64,84
7	Harapan Baru	774	658	84,98	652	84,2
8	Loa Bakung	807	354	43,86	291	36,06
9	Karang Asam	703	572	81,36	578	82,21
10	Lok Bahu	595	611	102,73	555	93,31
11	Wonorejo	700	671	95,83	651	92,97
12	Air Putih	857	893	104,26	838	97,84
13	Juanda	634	358	56,44	373	58,8
14	Segiri	840	785	93,44	773	92,01
15	Pasundan	574	565	98,47	519	90,46
16	Samarinda Kota	750	768	102,33	731	97,4
17	Sidomulyo	1.563	750	47,99	703	44,98
18	Sei Kapih	298	246	82,52	243	81,51
19	Makroman	350	334	95,4	251	71,69
20	Sambutan	544	545	100,11	541	99,37
21	Bengkuring	958	539	56,25	457	47,69
22	Sempaja	454	392	86,44	390	86
23	Sei Siring	356	194	54,46	265	74,4
24	Lempake	432	352	81,47	342	79,16
25	Remaja	810	697	86,08	477	58,91
26	Temindung	1.504	1.493	99,24	1.493	99,24
Jumlah		17.850	14.734	82,54	13.638	76,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2020.

Jumlah ibu hamil di Kota Samarinda pada tahun 2020 sebanyak 17.850 orang dengan jumlah fasilitas kesehatan sebanyak 26 puskesmas diharapkan dapat melayani kebutuhan kunjungan ibu hamil di setiap wilayah. Wilayah Puskesmas Sidomulyo memiliki jumlah ibu hamil yang paling banyak yakni sebanyak 1.563 orang. Kemudian Puskesmas Temindung juga memiliki cakupan ibu hamil terbanyak setelah Puskesmas Sidomulyo dengan jumlah 1.504 orang. Sedangkan cakupan ibu hamil paling sedikit ada di Puskesmas Bantuas dengan jumlah 96 orang. Banyaknya cakupan jumlah ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan tidak berbanding lurus dengan banyak kunjungan ibu hamil di wilayahnya. Seperti halnya yang terjadi di Puskesmas Sidomulyo dengan jumlah ibu hamil sebanyak 1.563 orang namun kunjungan K1 hanya 47,99% dan K4 semakin menurun menjadi 44,98%. Sedangkan di Puskesmas dengan cakupan ibu hamil sebanyak 1.504 orang, kunjungan K1 mencapai 99,24 orang dan K4 sebanyak 99,24%.

Kunjungan ibu hamil dapat mencapai di atas 100% karena beberapa ibu hamil tidak selamanya melakukan kunjungan baik K1 maupun K4 di wilayahnya. Seperti yang terjadi di Puskesmas Baka mencapai angka 113.76% untuk K1 tetapi K4 menurun menjadi 83.60% dari jumlah cakupan ibu hamil sebanyak 756 orang. Jumlah kunjungan ibu hamil paling rendah berada di Puskesmas Loa Bakung dengan cakupan ibu hamil sebanyak 807 orang baik K1 maupun K4 sangat rendah yakni untuk K1 sebanyak 43.86% dan K4 turun menjadi 36.06%.

5. Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan

Proses atau peristiwa persalinan ibu ketika melahirkan dapat terjadi di rumah maupun di pelayanan kesehatan. Ketika persalinan di rumah dapat ditangani atau ditolong oleh tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan. Jika merujuk pada tabel 9 yang menunjukkan banyaknya ibu hamil di Kota Samarinda 17.042 orang. Namun tidak semua proses persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Masih ada beberapa orang menjalani proses persalinan oleh non-nakes. Tempat bersalin pun tidak dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Jumlah Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2020

No.	Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM)	Jumlah Ibu Bersalin	Persalinan Ditolong Nakes (PN)			
			PN	%	PN di Fasyankes	%
1	Palaran	821	742	90,4	742	90,4
2	Bantuas	92	82	89,04	82	89,04
3	Bukuan	359	341	95,08	340	94,81
4	Mangkupalas	610	467	76,56	467	76,56
5	Baqa	722	832	115,3	832	115,3
6	Trauma Center	592	488	82,47	488	82,47
7	Harapan Baru	739	642	86,86	642	86,86
8	Loa Bakung	770	447	58,02	447	58,02
9	Karang Asam	671	522	77,78	522	77,78
10	Lok Bahu	568	566	99,69	566	99,69
11	Wonorejo	668	607	90,81	607	90,81
12	Air Putih	818	760	92,96	759	92,83
13	Juanda	606	441	72,83	441	72,83
14	Segiri	802	712	88,78	710	88,53
15	Pasundan	548	487	88,92	487	88,92

16	Samarinda Kota	716	758	105,81	758	105,81
17	Sidomulyo	1492	928	62,21	928	62,21
18	Sungai Kapih	285	230	80,83	230	80,83
19	Makroman	334	302	90,36	302	90,36
20	Sambutan	520	522	100,45	522	100,45
21	Bengkuring	915	612	66,91	612	66,91
22	Sempaja	433	412	95,17	412	95,17
23	Sungai Siring	340	240	70,59	239	70,29
24	Lempake	412	311	75,41	311	75,41
25	Remaja	773	599	77,5	598	77,37
26	Temindung	1436	1436	100	1436	100
	Rumah Sakit	-	-	-	-	-
	Jumlah	17.042	14.486	85,8	14.480	85,76

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2020.

Data dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda menyatakan bahwa jumlah ibu bersalin pada tahun 2020 sebanyak 17.042 orang. Jumlah ibu hamil tertinggi berada di Sidomulyo dan Temindung. Sedangkan paling rendah di Bantuas. Dari jumlah 17.042 ibu hamil tersebut yang ditolong oleh nakes sebanyak 14.486 orang dan yang proses persalinannya dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebanyak 1.436 orang.

Berdasarkan data tersebut ternyata jika dilihat berdasarkan banyaknya ibu saat melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan adalah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Temindung yang mencapai angka 100%. Padahal jika dilihat banyaknya jumlah ibu hamil paling banyak ada di Sidomulyo yakni 1.492 orang, akan tetapi yang melahirkan menggunakan pertolongan tenaga kesehatan hanya 928 orang (62.21%). Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Loa Bakung merupakan jumlah terendah ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Dari jumlah ibu hamil sebanyak 770 orang, yang melahirkan dengan pertolongan tenaga kesehatan hanya 58.02%.

Seseorang yang melahirkan dapat memilih di rumah ataupun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dari jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat sebanyak 26 selama tahun 2020 telah melayani 17.042 ibu melahirkan. Puskesmas yang paling banyak melayani ibu melahirkan adalah Puskesmas Baka dengan jumlah ibu hamil sebanyak 722 orang, namun ada 832 ibu yang melahirkan di Puskesmas tersebut hingga mencapai angka 115.30%. Sebaliknya di Puskesmas Loa Bakung dengan jumlah ibu hamil sebanyak 770 orang namun yang melahirkan di Puskesmas hanya 447 orang (58.02%).

6. Pelayanan Nifas

Nifas adalah keluarnya darah dari rahim karena sebab melahirkan atau setelah melahirkan. Masa nifas umumnya berlangsung selama 6 minggu. Perempuan yang sedang mengalami masa nifas setidaknya melakukan kunjungan tiga kali. Kemenkes membagi dalam 3 kunjungan yakni kunjungan KF1 yaitu 6 jam s.d. 3 hari setelah persalinan, KF 2 adalah 4—28 hari setelah persalinan, dan KF 3 adalah 29—42 hari setelah perkawinan. Dalam menjalani masa nifas seorang ibu perlu mendapatkan edukasi dari petugas kesehatan yang berada di wilayahnya. Oleh karena itu keberadaan layanan kesehatan yang berupa Puskesmas sangat diperlukan oleh perempuan yang sedang menjalani masa nifas. Adapun jumlah Pelayanan Nifas yang terdapat di Kota Samarinda tertera pada tabel 8 berikut ini.

Tabel 10. Jumlah Pelayanan Nifas Kota Samarinda Tahun 2020

No	Puskesmas	Cakupan Kunjungan Nifas
----	-----------	-------------------------

		Jumlah Ibu Nifas	K F 1		K F 2		K F 3	
			ABS	%	ABS	%	ABS	%
1	Palaran	821	742	90,4	742	90,4	742	90,4
2	Bantuas	92	82	89,04	84	91,21	87	94,47
3	Bukuan	359	341	95,08	360	100,38	294	81,98
4	Mangkupalas	610	468	76,72	380	62,29	335	54,92
5	Baka	722	832	115,3	660	91,46	634	87,86
6	Trauma Center	592	488	82,47	488	82,47	466	78,75
7	Harapan Baru	739	642	86,86	642	86,86	617	83,48
8	Loa Bakung	770	447	58,02	292	37,9	156	20,25
9	Karang Asam	671	522	77,78	501	74,65	535	79,72
10	Lok Bahu	568	566	99,96	553	97,4	498	87,72
11	Wonorejo	668	607	90,81	541	80,94	605	90,52
12	Air Putih	818	760	92,96	760	92,96	777	95,03
13	Juanda	606	451	74,48	464	76,63	454	74,98
14	Segiri	802	712	88,78	712	88,78	707	88,16
15	Pasundan	548	487	88,92	384	70,11	365	66,64
16	Samarinda Kota	716	758	105,81	553	77,19	636	88,78
17	Sidomulyo	1.492	924	61,94	924	61,94	949	63,61
18	Sei Kapih	285	230	80,83	230	80,83	230	80,83
19	Makroman	334	303	90,66	249	74,5	186	55,65
20	Sambutan	520	527	101,41	517	99,49	510	98,14
21	Bengkuring	915	597	65,27	490	53,57	387	42,31
22	Sempaja	433	412	95,17	406	93,79	412	95,17
23	Sei Siring	340	265	77,94	235	69,12	243	71,47
24	Lempake	412	311	75,41	311	75,41	299	72,5
25	Remaja	773	599	77,5	598	77,37	594	76,85
26	Temindung	1.436	1.440	100,27	1440	100,27	1.440	100,27
Jumlah		17.042	14.513	86,15	13.516	79,32	13.158	77,22

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2020.

Jumlah Pelayan Nifas di Kota Samarinda berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun 2020 sebanyak 26 yang tersebar di 10 kecamatan. Tahun 2020 terdapat ibu nifas sebanyak 17.042 orang, jumlah terbanyak ibu nifas terdapat di Sidomulyo sebanyak 1.492 orang dan Temindung sebanyak 1.436 orang. Sebaliknya di Bantuas hanya berjumlah 92 ibu nifas dan Sungai Kapih sebanyak 265 ibu nifas. Apabila

dilihat berdasarkan kunjungan pada KF1, KF2, dan Kf3 berada di Temindung hingga jumlah kunjungannya melebihi ABS hingga melebihi 100% seperti pada KF1, Kf2, dan KF3 sebanyak 100.27%. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa orang lebih banyak memilih di Pelayanan Nifas tersebut. Sedangkan yang terjadi di Pelayanan Nifas Bengkuring pengunjung KF1, KF2, dan KF3 paling rendah yakni KF1 sebanyak 65,27%, KF@ semakin menurun menjadi 53,57% dan di fase KF3 hanya 42,31%.

7. Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Masalah gizi di Indonesia yang terbanyak adalah gizi kurang. Anak balita (0-5 tahun) merupakan kelompok umur yang paling sering menderita akibat kekurangan gizi atau termasuk salah satu kelompok masyarakat yang rentan gizi. Keadaan gizi yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal. Namun, berbagai penyakit gangguan gizi dan gizi buruk akibat tidak baiknya mutu makanan maupun jumlah makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing orang masih sering ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Rendahnya status gizi jelas berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena status gizi memengaruhi kecerdasan, daya tahan tubuh terhadap penyakit, kematian bayi, kematian ibu dan produktivitas kerja.

Kementerian Kesehatan menggunakan dua kriteria untuk mengukur kualitas gizi balita yakni gizi buruk dan gizi kurang. Gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur. Berdasarkan Kemenkes, 2011 indikator Balita dikategorikan gizi buruk apabila indeks Berat Badan menurut Umur kurang dari 3 SD (Kemenkes, 2011). Istilah gizi buruk digunakan oleh kalangan gizi, kesehatan dan kedokteran sebagai tolok ukur kualitas kesehatan. Sedangkan gizi kurang adalah suatu keadaan tubuh dalam yang pada waktu tertentu kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi. Salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan di suatu daerah ditentukan oleh kondisi gizi balita pada waktu tertentu. Kondisi balita dengan status gizi buruk dan gizi kurang berdasarkan jenis kelamin di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel 9 berikut.

Tabel 11. Jumlah Balita Gizi Buruk dan Jumlah Balita Gizi Kurang Tahun 2020

No	Kecamatan	Balita Gizi Buruk		Balita Gizi Kurang	
		L	P	L	P
1	Palaran	22	20	87	61
2	Samarinda Ilir	12	11	15	14
3	Samarinda Kota	8	7	12	12
4	Sambutan	2	3	5	6
5	Samarinda Seberang	17	14	19	21
6	Loa Janan Ilir	20	11	41	28
7	Sungai Kunjang	21	19	91	83
8	Samarinda Ulu	18	6	55	51
9	Samarinda Utara	0	0	19	13
10	Sungai Pinang	10	7	18	14
TOTAL		130	98	362	303

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2020.

Sesuai data yang tersedia dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2020 jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang hanya meliputi 7 kecamatan. Ada dua kecamatan yang datanya nihil yakni Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Pinang. Jumlah gizi buruk di kota Samarinda yang tersebar di 7 kecamatan sebanyak 187 anak balita yang terdiri atas 102 balita laki-laki dan 85 anak balita perempuan. Apabila dilihat per kecamatan angka tertinggi ada di Kecamatan Palaran yakni 42 orang dengan rincian balita

laki-laki sebanyak 22 orang dan balita perempuan sebanyak 20 orang. Sedangkan jumlah balita buruk terendah adalah di Kecamatan Sambutan hanya 5 anak yakni balita laki-laki sebanyak 2 orang dan balita perempuan sebanyak 3 orang. Secara umum penderita balita gizi buruk banyak dialami oleh balita laki-laki daripada balita perempuan.

Seperti halnya gizi buruk di Kota Samarinda jumlah balita gizi kurang juga untuk laki-laki lebih tinggi daripada balita perempuan. Secara keseluruhan jumlah balita gizi buruk sebanyak 174 anak balita yang terdiri atas balita laki-laki sebanyak 91 anak dan balita perempuan sebanyak 83 anak. Kondisi balita gizi kurang terbanyak ada di Kecamatan Sungai Kunjang yakni 174 anak dengan rincian balita laki-laki sebanyak 91 anak dan balita perempuan sebanyak 83 anak. Di Kecamatan Palaran juga memiliki jumlah balita gizi kurang yang cukup tinggi yakni sebanyak 148 anak yang terdiri atas balita laki-laki sebanyak 87 anak dan balita perempuan sebanyak 61 anak. Sedangkan jumlah balita gizi kurang berada di Kecamatan Sambutan hanya 11 anak dengan rincian balita laki-laki sebanyak 5 orang dan balita perempuan sebanyak 6 orang.

Tabel 12. Jumlah Balita Gizi Lebih dan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Balita Gizi Lebih		Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan	
		L	P	L	P
1	Palaran	1	5	1	5
2	Samarinda Ilir	0	0	0	0
3	Samarinda Kota	0	0	0	0
4	Sambutan	0	0	0	0
5	Samarinda Seberang	2	0	2	0
6	Loa Janan Ilir	0	0	0	0
7	Sungai Kunjang	0	0	0	0
8	Samarinda Ulu	0	0	0	0
9	Samarinda Utara	1	0	1	0
10	Sungai Pinang	0	0	0	0
Total		4	5	4	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2020.

Hasil pengamatan status gizi anak di Kota Samarinda tahun 2020, dari 10 Kecamatan (Tabel 10), Total Balita Gizi Lebih yaitu 9 balita yang terdiri atas 4 balita perempuan dan 5 balita laki-laki, sedangkan Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan total 9 balita yang terdiri atas 4 balita perempuan dan 5 balita laki-laki. Dari 10 Kecamatan di Kota Samarinda, Kecamatan Palaran yang termasuk tertinggi, yaitu ada 6 balita gizi lebih dan 6 balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan, dan keduanya di dominasi oleh perempuan, yaitu 5 balita.

Tabel 13. Jumlah Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Bayi Baru Lahir ditimbang			Jumlah Bayi BBLR			% Bayi BBLR
		L	P	L+P	L	P	L+P	P
1	Palaran	423	358	781	23	28	51	71,08
2	Samarinda Ilir	398	416	814		1	1	0,12
3	Samarinda Kota	435	414	849				
4	Sambutan	619	641	1260	8	8	16	1,27

5	Samarinda Seberang	596	662	1258		2	2	0,16
6	Loa Janan Ilir	556	525	1081	15	16	31	5,06
7	Sungai Kunjang	1059	1014	2073	23	21	44	2,12
8	Samarinda Ulu	1232	1234	2466	3	1	4	0,16
9	Samarinda Utara	835	955	1790	20	13	33	1,84
10	Sungai Pinang	1014	1001	2015	4	9	13	0,65
TOTAL		7362	7402	14764	104	122	226	1,53

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2020.

Pada Tabel 13, terlihat bahwa total bayi yang ditimbang untuk 10 Kecamatan di Kota Samarinda yaitu 14764 balita, yang terdiri atas laki-laki 7362 balita dan perempuan 7042 balita. Dari Total bayi yang ditimbang 104 balita laki-laki dan 122 balita perempuan yang total 226 atau sekitar 1,53 % Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

Masalah gizi sebenarnya bukan masalah yang hanya disebabkan oleh kemiskinan tetapi Juga karena aspek sosial-budaya (kepercayaan, pendidikan, dan pekerjaan) yang ada di masyarakat kita, sehingga menyebabkan tindakan yang tidak menunjang tercapainya gizi yang memadai untuk balita. Keadaan sosial ekonomi suatu keluarga sangat memengaruhi tercukupi atau tidaknya kebutuhan primer, sekunder, serta perhatian dan kasih sayang yang akan diperoleh anak. Hal tersebut tentu berkaitan erat dengan pendapatan keluarga, jumlah saudara dan pendidikan orang tua.

8. Balita Pendek (*Stunting*)

Stunting (kerdil) adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita *stunting* termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita *stunting* di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal.

Tabel 14. Jumlah Balita Pendek Stunting Tahun 2020

No	Kecamatan	Sangat Pendek			Pendek		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Palaran	58	32	90	0	0	0
2	Samarinda Ilir	20	11	31	0	0	0
3	Samarinda Kota	13	6	19	0	0	0
4	Sambutan	2	1	3	0	0	0
5	Samarinda Seberang	13	7	20	0	0	0
6	Loa Janan Ilir	27	25	52	0	0	0
7	Sungai Kunjang	47	30	77	0	0	0

8	Samarinda Ulu	34	29	63	0	0	0
9	Samarinda Utara	6	13	19	0	0	0
10	Sungai Pinang	23	12	35	0	0	0
TOTAL		243	166	409	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2020.

Hasil penelitian yang dilakukan di 10 Kecamatan Kota Samarinda data tahun 2020 (Tabel 11) terlihat bahwa dari jumlah balita yang sangat pendek 409 balita, 243 balita laki-laki dan 166 balita perempuan. Sedangkan balita pendek dari 10 kecamatan tidak ditemukan. Jumlah balita sangat pendek yang paling banyak yaitu di Kecamatan Palaran, 90 balita yang terdiri atas laki-laki 58 dan perempuan 32, di dominasi oleh laki-laki atau sekitar 64 persen balita laki-laki. Dan yang paling sedikit di Kecamatan Sambutan, total 3 balita yang terdiri atas 2 balita laki-laki dan 1 balita perempuan. Secara umum balita sangat pendek di 10 Kecamatan Kota Samarinda di dominasi oleh laki-laki yaitu sekitar 59,4 persen.

9. Bayi dengan Asi Eksklusif

Menyusui bayi secara eksklusif selama enam bulan memiliki banyak manfaat, baik untuk ibu maupun untuk bayinya. Air Susu Ibu (ASI) merupakan suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garam organik yang dikeluarkan oleh kelenjar memari manusia. Sebagai satu-satunya makanan alami yang berasal dari ibu, ASI menjadi makanan terbaik dan sempurna untuk bayi karena mengandung zat gizi sesuai kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. ASI eksklusif adalah pemberian ASI (air susu ibu) sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberikan makanan lain, walaupun hanya air putih sampai bayi berumur 6 bulan. Setelah itu diberi makanan padat pendamping yang cukup dan sesuai. Sedangkan ASI tetap diberikan sampai usia 2 tahun atau lebih.

Tabel 15. Jumlah Bayi mendapatkan Asi Eksklusif selama 6 bulan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Bayi Umur 6 (enam) Bulan			Bayi mendapatkan ASI Eksklusif 6 bulan			% Bayi ASI Eksklusif 6 bulan
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Palaran	161	145	306	138	115	253	82,68
2	Samarinda Ilir	620	634	1254	371	366	737	58,77
3	Samarinda Kota	34	39	73	31	34	65	89,04
4	Sambutan	107	107	214	75	79	154	71,96
5	Samarinda Seberang	242	303	545	194	239	433	79,45
6	Loa Janan Ilir	273	289	562	151	149	300	53,38
7	Sungai Kunjang	403	428	831	289	300	589	70,88
8	Samarinda Ulu	649	601	1250	404	405	809	64,72
9	Samarinda Utara	569	544	1113	528	508	1036	93,08
10	Sungai Pinang	59	66	125	43	48	91	72,8
TOTAL		3117	3156	6273	2224	2243	4467	71,21

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2020.

Jumlah bayi mendapat Asi Eksklusif di 10 Kecamatan Kota Samarinda tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 15. Pada Tabel 15 terlihat bahwa jumlah bayi umur 6 bulan di 10 Kecamatan Kota Samarinda sebanyak 6273 bayi, yang terdiri atas 3117 bayi laki-laki dan

3156 bayi perempuan. Sedangkan Total bayi yang mendapat Asi eksklusif yaitu 4467 bayi atau sekitar 71,21 %, yang terdiri atas 2224 bayi laki-laki dan 2243 bayi perempuan. Jumlah presentasi bayi yang mendapat Asi eksklusif tertinggi di Kecamatan Samarinda Kota yaitu 89,04 % dan terendah di Kecamatan Loa Janan Ilir, yaitu 53,38 %. Data presentasi bayi yang mendapat Asi eksklusif di setiap Kecamatan Kota Samarinda sudah termasuk baik karena sudah lebih dari 50 persen, WHO tahun 2025 yaitu 50 persen.

Berdasarkan penelitian terbaru angka keberhasilan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif selama pandemi Covid-19 di Indonesia menunjukkan prevalensi yang meningkat tajam. Penelitian perilaku ibu menyusui selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia oleh tim peneliti *Health Collaborative Center* (HCC) menunjukkan bahwa prevalensi keberhasilan pemberian ASI eksklusif di Indonesia pada tahun 2020 mencapai sebesar 89,4 persen. Pasalnya, pada tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19 melanda, Indonesia tergolong negara yang rendah keberhasilan program ASI eksklusif di dunia, dengan prevalensi sekitar 30-50 persen saja secara nasional.

C. Pendidikan

Berdasar pada amanat Undang-undang Dasar 1945, maka pengertian pendidikan di sekolah dasar merupakan upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertakwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. Pendidikan di sekolah dasar merupakan pendidikan anak yang berusia antara 7 sampai dengan 13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat bagi siswa.

1. Sekolah Dasar

Tabel 16. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Tingkat Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2020

No	Kecamatan	Negeri			Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	Palaran	24	325	5909	7	67	1193
2	Samarinda Ilir	10	250	5947	4	51	935
3	Samarinda Kota	11	230	4831	8	156	2946
4	Sambutan	14	194	4481	5	58	801
5	Samarinda Seberang	13	263	6307	7	69	1499
6	Loa Janan Ilir	10	199	4574	7	105	2434
7	Sungai Kunjang	21	508	11328	13	217	3362
8	Samarinda Ulu	21	431	8934	15	255	4411
9	Samarinda Utara	26	387	8121	14	169	2301
10	Sungai Pinang	16	329	7541	14	178	2284
Samarinda		166	3116	67973	94	1325	22166

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Samarinda, 2020.

Tabel 16 jumlah sekolah, guru dan murid tingkat sekolah dasar, baik sekolah negeri maupun swasta. Jumlah sekolah Dasar negeri dari 10 kecamatan di Kota Samarinda yaitu 166 sekolah dengan jumlah guru 3116 dan murid 67973. Data Total jumlah guru dan murid di 10 Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2020 (Tabel 12) terlihat bahwa jumlah guru jika dibandingkan dengan jumlah murid, yaitu rasio 1:22 untuk sekolah negeri. Kalau dilihat di setiap kecamatan untuk sekolah dasar negeri rasio guru dan murid Kecamatan Samarinda Seberang mempunyai rasio guru dan murid yang tertinggi yaitu 1:26 sedangkan yang terendah yaitu Kecamatan Palaran rasio guru dan murid 1:18. Total jumlah sekolah 166 dengan jumlah murid 67973 atau sekitar 1:409,5. Untuk perbandingan jumlah murid dan sekolah di 10 Kecamatan Kota Samarinda yaitu dari 246:1 sampai dengan 594:1. Data perbandingan jumlah sekolah dan murid tertinggi di Kecamatan Samarinda Ilir, jumlah sekolah 10 dengan total murid 5940 (594:1), dan yang terendah di Kecamatan Palaran, jumlah sekolah 24 dan jumlah murid 5909 (296:1).

Untuk sekolah dasar Swasta di 10 Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2020 (Tabel 12), terlihat bahwa ada 94 sekolah dengan jumlah guru 1325 dan jumlah murid 22166. Data Total jumlah guru dan murid di 10 Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2020 (Tabel 12) terlihat bahwa jumlah guru jika dibandingkan dengan jumlah murid rasio 1:17. Untuk jumlah sekolah dengan murid di sekolah dasar swasta yaitu 94 sekolah dengan jumlah murid 22166 atau sekitar 1:235,8. Dari tabel 12 apabila dilihat rasio guru dan murid tertinggi di kecamatan Loa Janan Ilir rasio 1:23 dan yang terendah di Kecamatan Sungai Pinang, rasio guru murid 1:13. Sedangkan untuk rasio sekolah dan murid tertinggi di Kecamatan Samarinda Kota 1:368 dan terendah di Kecamatan Sungai Pinang 1:163.

Secara umum sekolah dasar negeri jika dibandingkan dengan sekolah swasta rasio guru dan murid lebih kecil di Swasta dari sekolah negeri, begitu pula untuk rasio sekolah dan murid sekolah negeri lebih tinggi jika dibandingkan dengan sekolah swasta. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, di setiap sekolah dasar (SD), sekolah setidaknya harus menyiapkan 1 guru untuk setiap 32 siswa. Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2008 tentang guru pasal 17, menyatakan bahwa rasio murid dan guru untuk sekolah dasar yaitu 20:1 atau 1:20. Apabila jumlah rasio guru dan murid sesuai standar maka beban guru semakin ringan dan perhatian ke murid bisa bertambah di mana otomatis indikator mutu pendidikan semakin meningkat.

2. Sekolah Menengah Pertama

SMP (Sekolah Menengah Pertama) merupakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dan pembelajaran di tingkat SMP memberikan penekanan peletakan fondasi dalam menyiapkan generasi agar menjadi manusia yang mampu menghadapi era yang semakin berat. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 17 tentang pendidikan dasar disebutkan bahwa pendidikan dasar terdiri atas SD (Sekolah Dasar)/sederajat dan SMP (Sekolah Menengah Pertama)/sederajat.

Tabel 17. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2020

No	Kecamatan	Negeri			Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid

1	Palaran	6	126	2331	4	49	1601
2	Samarinda Ilir	2	81	1796	5	68	2255
3	Samarinda Kota	6	235	3841	7	105	1643
4	Sambutan	6	156	2291	4	49	13868
5	Samarinda Seberang	2	55	995	5	56	1471
6	Loa Janan Ilir	5	159	3038	6	100	0
7	Sungai Kunjang	6	191	3568	13	219	624
8	Samarinda Ulu	7	300	5580	14	202	903
9	Samarinda Utara	10	223	3882	12	138	1368
10	Sungai Pinang	2	19	494	14	160	196
Samarinda		52	1545	27816	84	1146	23929

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Samarinda, 2020.

Jumlah sekolah, guru dan siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 10 Kecamatan Di Kota Samarinda Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 17. Pada Tabel 13 jumlah sekolah Menengah Pertama Negeri sebanyak 52 dengan jumlah guru 1545 dan siswa sebanyak 27816, perbandingan jumlah guru dan siswa 1: 18. Untuk Sekolah dan siswa 1: 534,9. Sekolah Menengah Pertama di 10 Kecamatan Kota Samarinda untuk rasio guru dan siswa berada pada kisaran 1:15 sampai dengan 1: 26. Rasio tertinggi di Kecamatan Sungai Pinang (1:26) dan terendah di Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Samarinda Seberang (1: 15). Sedangkan untuk rasio sekolah dan siswa berada pada kisaran 1: 247—1: 898. Rasio sekolah dan siswa tertinggi di Kecamatan Samarinda Ilir 1:898 dan rasio terendah di Kecamatan Sungai Pinang. Sekolah Menengah Pertama di 10 Kecamatan Kota Samarinda, rasio guru siswa tertinggi dan rasio sekolah siswa terendah di Kecamatan Sungai Pinang.

Pada Tabel 17 untuk Sekolah Menengah Pertama Swasta, total jumlah sekolah adalah 84, guru 1146, dan siswa 23929. Perbandingan antara guru dan siswa sekolah swasta 1:21 sedangkan untuk sekolah dan siswa 1:284,8. Rasio guru dan siswa di 10 Kecamatan Kota Samarinda berada pada kisaran 1:1,22—1:283. Sedangkan untuk rasio sekolah dan siswa 1:14 – 1:451. Rasio guru dan siswa tertinggi di Kecamatan Sambutan (1:283), dan terendah di Kecamatan Sungai Pinang (1:1,22). Rasio sekolah dan siswa tertinggi di Kecamatan Samarinda Ilir (1:451) dan terendah di Kecamatan Sungai Pinang (1: 14). Ada data yang sangat berbeda dengan yang lain yaitu di Kecamatan Sambutan jumlah guru 49 sedangkan siswa 13868 atau 1:283. Loa Janan Ilir jumlah guru 100 orang dan siswa 0, Sungai Kunjang 1:3; Sungai Pinang 1:1,22. Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2008 tentang guru pasal 17, menyatakan bahwa rasio siswa dan guru untuk sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 20:1, atau 1:20 (guru dan siswa), dan untuk MTs 1:15.

3. Sekolah Menengah Atas

Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat). Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12.

Tabel 18. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2020

No	Kecamatan	Negeri			Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	Palaran	4	122	2004	4	31	240

2	Samarinda Ilir	0	0	0	2	30	162
3	Samarinda Kota	3	172	2076	9	178	2383
4	Sambutan	3	78	1196	3	39	226
5	Samarinda Seberang	1	24	290	2	19	235
6	Loa Janan Ilir	5	248	3154	7	93	783
7	Sungai Kunjang	5	187	2051	8	105	858
8	Samarinda Ulu	9	492	6098	18	327	2822
9	Samarinda Utara	11	371	4582	9	154	1281
10	Sungai Pinang	2	92	1146	13	173	1457
Samarinda		43	1786	22597	75	1149	10447

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Samarinda, 2020.

Jumlah Sekolah Guru dan Siswa Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2020 dapat dilihat Pada Tabel 18. Pada Tabel 18 terlihat bahwa jumlah sekolah menengah Atas Negeri di 10 kecamatan di Kota Samarinda yaitu 43 sekolah dengan jumlah guru 1786 dan siswa 22597, dengan perbandingan rasio guru dan siswa 1:13. Untuk rasio sekolah dan siswa 1:525,5.

Sekolah Menengah Atas di 10 Kecamatan Kota Samarinda jumlah Sekolah terbanyak di Kecamatan Samarinda Utara 9 sekolah dan 1 Sekolah di Samarinda Seberang, sedangkan di Kecamatan Samarinda Ilir tidak ada Sekolah Menengah Atas Negeri. Rasio guru dan siswa SMA Negeri di 10 Kecamatan Kota Samarinda yaitu 1:11—1:16. Rasio guru siswa tertinggi di Kecamatan Palaran 1:16 dan terendah di Kecamatan Sungai Kunjang. Rasio sekolah dan siswa di 10 Kecamatan Kota Samarinda 1:290—1:693, tertinggi di Kecamatan Samarinda Kota dan terendah di Kecamatan Samarinda Seberang.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta di 10 Kecamatan Kota Samarinda, ada 75 sekolah dengan jumlah guru 1149 dan siswa 10447 (Tabel 18). Perbandingan rasio guru dan sekolah di 10 Kecamatan Kota Samarinda 1:9, dan rasio sekolah dan siswa 1:139. Rasio guru dan siswa di 10 Kecamatan Kota Samarinda 1:5—1:13, tertinggi di Kecamatan Samarinda Kota dan terendah di Kecamatan Palaran. Rasio sekolah dan siswa 1:60—1:264. Rasio sekolah dan siswa tertinggi di Kecamatan Samarinda Kota dan terendah di Kecamatan Palaran. Sekolah Menengah Atas Swasta di Kota Samarinda baik rasio guru dan siswa maupun rasio sekolah dan siswa, tertinggi di Kecamatan Kota Samarinda dan terendah di Kecamatan Palaran. Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2008 tentang guru pasal 17, menyatakan bahwa rasio siswa dan guru untuk SMA, yaitu 20:1, atau 1:20 (guru dan siswa), dan untuk SMK dan MA, yaitu 1:15.

Setiap manusia membutuhkan pendidikan karena pendidikan sangat penting artinya bagi perkembangan manusia. Melalui pendidikan, manusia tak hanya mendapatkan pengajaran keahlian khusus tetapi juga sesuatu yang lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Maka dari itu dikatakan bahwa kualitas pendidikan sangat menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dicetaknya.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu, tanpa melihat ketepatan usia sekolah pada jenjang tersebut. Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD, SMP/MTs, SMA/MA dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 19. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020

No	Jenjang	Tahun 2020	
		L	P
1	SD /MI	108,2	106,28
2	SMP /MTs	101,18	101,05
3	SMA /MA	93,02	96,03

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Samarinda, 2020.

Pada tabel 19, menunjukkan jumlah anak sekolah pada jenjang SD di Kota Samarinda yang terdiri atas 10 Kecamatan, Jumlah tersebut termasuk anak yang masuk sekolah dengan usia yang tepat sesuai usia resmi dalam jenjang pendidikan SD/MI yaitu 7–12 tahun. Hasil perhitungan pada Tabel 19, menunjukkan bahwa terdapat 108,2 persen (laki-laki) dan 106,28 (perempuan) penduduk yang berusia 7–12 tahun yang bersekolah SD/MI di Kecamatan Kota Samarinda. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/MTs di Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel 19. Pada Tabel 19, menunjukkan jumlah anak sekolah pada jenjang SMP/MTs di Kota Samarinda yang terdiri atas 10 Kecamatan, jumlah tersebut termasuk anak yang berusia 13—15 tahun. Hasil perhitungan pada Tabel 19, menunjukkan bahwa terdapat 101,18 persen (laki-laki) dan 101,05 persen (perempuan) penduduk yang berusia 13—15 tahun yang bersekolah SMP/MTs di 10 Kecamatan Kota Samarinda. Dari data terlihat bahwa APK pada tingkat SMP/MTs di Kota Samarinda melebihi 100 persen, yang berarti bahwa populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/MA di Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel 19. Pada Tabel 19, menunjukkan jumlah anak sekolah pada jenjang SMA/MA di Kota Samarinda yang terdiri atas 10 Kecamatan, jumlah tersebut termasuk anak yang berusia 16—18 tahun. Hasil perhitungan pada Tabel 19, menunjukkan bahwa terdapat 93,02 persen (laki-laki) dan 96,03 persen (perempuan) penduduk yang berusia 16—18 tahun yang bersekolah SMA/MA di 10 Kecamatan Kota Samarinda. Dari data terlihat bahwa APK pada tingkat SMA/MA di Kota Samarinda yaitu 93,02—96,03 persen (kurang dari 100 persen), yang berarti bahwa populasi murid yang bersekolah pada jenjang

pendidikan SMA/MA, masih ada yang berusia 16—18 tahun tidak mengikuti jenjang pendidikan tersebut.

Kualitas dari sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah atau kota akan sangat berhubungan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang ada di wilayah/kota tersebut. Partisipasi pendidikan tersebut menunjukkan partisipasi penduduk usia sekolah yang sedang mengenyam pendidikan pada setiap jenjang pendidikan. Tingkat partisipasi pendidikan dapat dihitung dengan menggunakan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Berdasarkan data Dinas pendidikan Kota Samarinda tahun 2020, jumlah penduduk usia sekolah dapat dihitung APK (Angka Partisipasi Kasar), angka persentase APK untuk jenjang pendidikan SD/MI pada penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan di Kota Samarinda sudah maksimal dan termasuk dalam kategori tinggi. Persentase APK SMP/MTs menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan SMP/MTs termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan persentase APK SMA/MA juga menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan SMA/MA termasuk dalam kategori tinggi.

5. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM), yaitu proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut, dengan melihat ketepatan usia sekolah pada jenjang tersebut. Hasil penelitian (data Dinas Kota Samarinda tahun 2020) Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, pada masyarakat di Kecamatan Kota Samarinda dapat di lihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Samarinda Tahun 2020

No	Jenjang	Tahun 2020	
		Laki-Laki	Perempuan
1	SD /MI	106,3	105,42
2	SMP /MTs	99,79	107,06
3	SMA /MA	72,74	71,72

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Samarinda, 2020.

Pada Tabel 20, Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/MI di Kecamatan Kota Samarinda tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 106,3 persen (laki-laki) dan 105,42 persen (perempuan) penduduk yang bersekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan SD di Kecamatan Kota Samarinda. penduduk usia 7—12 tahun masuk dalam kategori SD/MI. Pada tingkat SMP/MTs menunjukkan bahwa APM pada tingkat SMP/MTs ada 99,79 persen (laki-laki) dan 107,06 persen (perempuan) di Kecamatan Kota Samarinda. Tingkat pendidikan masuk pada usia 13—15 tahun yang masuk kategori SMP/MTs. Dari data menunjukkan bahwa APM termasuk dalam kategori sekolah tepat waktu (lebih dari 100 persen). Sedangkan APM pada tingkat SMP/MTs di Kecamatan Kota Samarinda tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 20. Pada Tabel 20 menunjukkan bahwa APM tingkat SMA/MA ada 72,74 persen (laki-laki) dan 71,72 persen (perempuan), tingkat pendidikan SMA/MA masuk dalam kategori Usia 16—18 tahun.

Persentase APM SD/MI, SMP/MTs menunjukkan kategori tinggi karena mencapai 100 persen. Sedangkan APM untuk jenjang SMP/MA termasuk kategori kurang dari 100 persen. Persentase nilai APM umumnya akan lebih rendah dari nilai APK, karena APM hanya menghitung penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu sesuai dengan jenjang pendidikannya. Selisih antara persentase nilai APK dan APM menunjukkan adanya penduduk usia sekolah yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah, sehingga persentase APK dapat mencapai lebih dari 100 dan persentase APM hanya mencapai 100, hal tersebut sesuai dengan Amaliah (2015), menyatakan bahwa APK biasanya dapat mencapai lebih dari 100 persen, sedangkan APM semestinya maksimal 100 persen.

Menurut Deacon & Firebough (1988), bahwa pengembangan modal manusia dapat dari proses belajar secara sadar ataupun tidak sadar yang dilakukan dalam keluarga. Orang tua yang menggunakan waktunya untuk mengajarkan anaknya melakukan tugas tertentu akan berkontribusi terhadap pembentukan kualitas dari seorang anak, seperti halnya pendidikan formal dalam sekolah yang dapat berkontribusi besar terhadap individu. Anak dalam sebuah keluarga merupakan harapan di masa depan, orang tua memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada anaknya untuk mencapai cita-cita di masa depan.

D. Ketenagakerjaan dan Ekonomi

1. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Simanjuntak (2005) menyatakan bahwa penduduk yang dianggap sebagai tenaga kerja potensial atau penduduk usia kerja yaitu penduduk yang telah mencapai umur 15—64 tahun dan berpotensi untuk memproduksi barang dan jasa.

Tabel 21. Data Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja			
	Bekerja	256.360	146.854	403.214
	Pengangguran Terbuka	16.754	8.385	25.139
2	Bukan Angkatan Kerja			
	Sekolah	36.971	35.454	72.425
	Mengurus Rumah Tangga	11.978	115.518	127.496
	Lainnya	17.278	9.416	26.694
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			65,19%
4	Tingkat Pengangguran			8,26%

Sumber: Disnaker, 2020.

Pada Tabel 21 data angkatan kerja menurut jenis kelamin di Kota Samarinda tahun 2020, yaitu untuk angkatan kerja termasuk kategori bekerja yaitu sebanyak 403.214 dengan rincian 256.360 laki-laki dan 146.854 perempuan. Dari data terlihat bahwa jumlah angkatan kerja yang bekerja laki-laki lebih banyak dari perempuan atau sekitar 63,58 persen laki-laki dan 36,42 persen perempuan. Angkatan kerja kategori pengangguran

terbuka sebanyak 25.139 dengan rincian jumlah laki-laki 16.754 dan perempuan 8.385 atau sekitar 66,65 persen laki-laki dan perempuan 33,35 persen.

Pada Tabel 21, angkatan kerja termasuk yang memasuki usia kerja dikategorikan bukan angkatan kerja pada usia sekolah yaitu sebanyak 72.425, yang terdiri atas laki-laki 36.971 dan perempuan 35.454, atau sekitar 51 persen laki-laki dan 49 persen perempuan. Kategori mengurus rumah tangga total 127.496 yang terdiri atas laki-laki 11.978 dan perempuan 115.518, ini di dominasi oleh perempuan yaitu sekitar 90%. Kategori lainnya total 26.694 yang terdiri atas laki-laki 17.278 (65 persen) dan perempuan 9.416 (35 persen).

Pada Tabel 21 juga terlihat bahwa tingkat partisipasi kerja yaitu sekitar 65,19 persen dan tingkat pengangguran 8,26 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sendiri merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil TPAK (Simanjuntak, 2005) dan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK selain jumlah penduduk, seperti pendidikan, jenis kelamin, usia dan lain-lain.

2. Pencari Kerja

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas tenaga kerja. Idealnya, tenaga kerja yang tersedia di suatu negara memiliki pendidikan yang memadai sesuai dengan kesempatan kerja yang tersedia, namun di negara-negara yang dalam kondisi masih sedang berkembang biasanya sering terjadi *mismatch* antara pendidikan dan pekerjaan yang ditekuninya. Struktur tingkat pendidikan tenaga kerja, sering diukur dengan proporsi tenaga kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Tabel 22. Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Samarinda Tahun 2020

No	Jenis Pendidikan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	41	10	51
2	SMP	89	28	117
3	SMA	1.352	906	2.258
4	Diploma	200	514	714
5	Sarjana (S-1)	564	555	1.119
6	Magister (S-2)	9	5	14
Jumlah		2.255	2.018	4.273

Sumber: Disnaker, 2020.

Jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Kota Samarinda tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 22. Pada Tabel 22 terlihat bahwa jumlah pencari kerja dari pendidikan terendah (SD) sampai pada pendidikan Magister (S-2), sedangkan untuk S-3 belum ada data pencari kerja. Jumlah pencari kerja pendidikan SD sampai dengan Magister total 4.273 dengan jumlah laki-laki 2.255 dan perempuan 2.018 atau sekitar 53 persen laki-laki dan 47 persen perempuan. Pada Tabel 22, jumlah pencari kerja untuk jenjang pendidikan SD sebanyak 51 dengan jumlah laki-laki 41 orang dan perempuan 10 orang (didominasi oleh laki-laki). Jenjang pendidikan SMP sebanyak 117 yang terdiri atas laki-laki 89 orang dan perempuan 28 orang atau sekitar 76 persen laki-laki. Jenjang SLTA jumlah pencari kerja 2.258 yang terdiri atas laki-laki 1352 dan

perempuan 906 orang, didominasi oleh laki-laki atau sekitar 60 persen. Untuk pendidikan sarjana S-1 jumlah 1.119 pencari kerja, 564 laki-laki dan 555 perempuan, kalau dilihat dari jumlah pencari kerja perempuan dan laki-laki untuk pendidikan sarjana hampir sama. Pencari kerja pendidikan magister sebanyak 14 orang dengan jumlah laki-laki 9 orang dan perempuan 5 orang. Secara keseluruhan bahwa jumlah pencari kerja untuk setiap jenjang pendidikan masih di dominasi oleh laki-laki.

3. Usaha Mikro dan Kecil

Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, selain berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, Usaha Mikro dan Kecil berperan penting dalam menyerap tenaga kerja. Usaha Mikro dan Kecil yang memiliki keinginan mengembangkan bisnisnya agar bertumbuh besar akan tetapi terkendala dokumen legalitas yang dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha. Di samping harus menghadapi proses yang mereka tidak pahami, sering kali mereka kebingungan memilih izin usaha yang dapat digunakan, apakah harus menggunakan izin usaha perorangan, izin usaha toko, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

Tabel 23. Jumlah IUMK Kota Samarinda Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Palaran	164	282	446
2	Samarinda Seberang	314	839	1153
3	Samarinda Ilir	302	638	940
4	Samarinda Kota	107	199	306
5	Samarinda Ulu	536	1020	1556
6	Samarinda Utara	297	615	912
7	Sungai Kunjang	585	1073	1658
8	Loa Janan Ilir	268	524	792
9	Sungai Pinang	401	762	1163
10	Sambutan	208	491	699
Jumlah		3182	6443	9625

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, 2020.

Izin Usaha Mikro Kecil atau sering disingkat IUMK adalah surat legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil. Jumlah IUMK (Izin usaha mikro dan kecil) di 10 Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2020 dapat di lihat pada Tabel 23. Total jumlah IUMK di 10 Kecamatan Kota Samarinda yaitu 9625, dengan 3182 pemilik laki-laki dan 6443 pemilik perempuan, atau sekitar 66,9 persen pemilik perempuan dan 33,1 persen pemilik laki-laki. Jumlah pemilik IUMK terbanyak di Kecamatan Sungai Kunjang, yaitu 1658, pemilik laki-laki 585 dan pemilik perempuan 1073 atau sekitar 65 persen pemilik perempuan dan 35 persen pemilik laki-laki. Sedangkan untuk IUMK yang terendah yaitu di Kecamatan Samarinda Kota dengan total 306, yang terdiri atas 107 (35 persen) pemilik laki-laki dan 199 (65 persen) pemilik perempuan. Secara keseluruhan data di 10 Kecamatan Kota Samarinda pemilik IUMK di dominasi oleh perempuan.

Saat ini, melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM), pemerintah mengeluarkan aturan terbaru yang memudahkan Usaha Mikro dan Kecil memperoleh izin usaha, yaitu *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil*

Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro-Kecil (“PermenkopUKM 2/2019”). Aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP tentang OSS”). Lahirnya kedua aturan terbaru ini semakin menyederhanakan prosedur pengajuan Izin Usaha Mikro dan Kecil sehingga sebagai pelaku usaha Mikro dan Kecil dapat segera melengkapi dokumen legalitas yang diperlukan.

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk usaha mikro dan usaha kecil. Hal ini diatur di PermenkoUKM Nomor 2 Tahun 2019. Aturan untuk IUMK terbaru ini menegaskan pula bahwa IUMK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Disebutkan pula pemohon IUMK meliputi Pelaku Usaha Mikro atau Usaha Kecil perorangan dan izin usaha ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha serta pengajuan Izin Komersial atau Izin Operasional.

E. Sosial

Bidang sosial umumnya berkaitan dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Menurut Kementerian Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

1. Penduduk Lanjut Usia Terlantar

Salah satu bentuk PMKS adalah lanjut usia terlantar. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan kriteria: (a) tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan (b) terlantar secara psikis, dan sosial.

Tabel 24. Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Kota Samarinda Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Palaran	324	350	674
2	Sambutan	223	350	573
3	Sungai Kunjang	198	332	530
4	Samarinda Seberang	120	147	267
5	Samarinda Kota	110	142	252
6	Samarinda Ilir	316	450	766
7	Samarinda Ulu	251	315	566
8	Sungai Pinang	167	219	386
9	Loa Janan Ilir	115	163	278
10	Samarinda Utara	362	267	629
Total		2186	2735	4921

Sumber: Dinas Sosial Kota Samarinda, 2020.

Data dari Dinas Sosial Kota Samarinda, sebagaimana Tabel 28, jumlah penduduk lanjut usia (lansia) terlantar di kota Samarinda Tahun 2020, berdasarkan 10 Kecamatan, yakni Palaran, Sambutan, Sungai Kunjang, Samarinda Seberang, Samarinda Kota, Samarinda ailir, Samarinda Ulu, Sunmgai Pinang, Loa Janan Ilir dan Samarinda yang berjumlah 4921 orang, dengan rincian laki-laki terdata 2186 orang dan perempuan terdata 2735 orang. Dari data tabel di atas, terlihat adanya dominasi lansia perempuan yang masuk kategori terlantar bila dibandingkan dengan lansia laki-laki, yaitu sebanyak 56%. Jumlah ini tergolong tinggi.

Rincian per Kecamatan sebagai berikut. Kecamatan Palaran berjumlah 674 orang dengan rincian laki-laki terdapat 324 orang dan perempuan 350 orang. Kecamatan Sambutan berjumlah 573 orang dengan rincian laki-laki terdapat 223 orang dan perempuan 350 orang. Kecamatan Sungai Kunjang berjumlah 530 dengan rincian laki-laki terdapat 198 orang dan perempuan 332 orang. Kecamatan Samarinda Seberang berjumlah 267 orang dengan rincian laki-laki terdapat 120 orang dan perempuan 147. Kecamatan Samarinda Kota berjumlah 252 orang dengan rincian laki-laki terdapat 110 dan perempuan 142 orang. Kecamatan Samarinda Ilir berjumlah 766 orang dengan rincian laki-laki terdapat 316 orang dan perempuan 450 orang. Kecamatan Samarinda Ulu berjumlah 566 orang, dengan rincian laki-laki terdapat 251 orang dan perempuan 315 orang. Kecamatan Sungai Pinang berjumlah 386 orang, dengan rincian laki-laki terdapat 167 orang dan perempuan 219 orang. Kecamatan Loa Janan Ilir berjumlah 278 orang, dengan rincian laki-laki terdapat 115 orang dan perempuan 163 orang. Kecamatan Samarinda Utara berjumlah 629 orang, dengan rincian laki-laki terdapat 362 orang dan perempuan 267 orang.

2. Anak Balita Terlantar

Selain lansia terlantar, jenis PMKS lain yang ditemukan di Kota Samarinda adalah anak balita terlantar. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Kriteria anak balita terlantar adalah (a) terlantar/tanpa asuhan yang layak; (b) berasal dari keluarga sangat miskin/miskin; (c) kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga; (d) anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga; (e) anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan (f) anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

Tabel 25. Jumlah Anak Balita Terlantar Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Palaran	0	0	0
2	Sambutan	0	0	0
3	Sungai Kunjang	0	1	1
4	Samarinda Seberang	0	0	0
5	Samarinda Kota	1	0	1
6	Samarinda Ilir	0	0	0
7	Samarinda Ulu	0	0	0
8	Sungai Pinang	0	0	0

9	Loa Janan Ilir	0	0	0
10	Samarinda Utara	0	1	1
Total		1	2	3

Sumber: Dinas Sosial Kota Samarinda, 2020.

Jumlah riil anak Jumlah riil anak balita terlantar berdasarkan jenis kelamin di kota Samarinda pada tahun 2020 berjumlah 3 anak balita. Di Kecamatan Palaran, Sambutan, Samarinda Seberang, Samarinda Ilir, Samarinda Ulu, Sungai Pinang, dan Loa Janan Ilir dalam keadaan aman karena tidak ditemukan anak balita terlantar. Ketiga anak balita terlantar ditemukan di Kecamatan Sungai Kunjang terdapat 1 anak balita perempuan, Kecamatan Samarinda Kota terdapat ada 1 anak balita laki-laki, dan Kecamatan Samarinda Utara terdapat 1 anak balita perempuan. Anak balita terlantar salah satunya diakibatkan oleh suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan balitanya secara wajar, baik jasmani, rohani, maupun sosial.

3. Anak Terlantar

Jenis PMKS lain yang terdapat di Kota Samarinda adalah anak terlantar. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 tahun sampai dengan 18 tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria anak terlantar adalah (a) berasal dari keluarga fakir miskin; (b) anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan (c) anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Tabel 26. Jumlah Anak Terlantar Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Palaran	80	85	165
2	Sambutan	60	90	150
3	Sungai Kunjang	70	80	150
4	Samarinda Seberang	100	75	175
5	Samarinda Kota	70	60	130
6	Samarinda Ilir	70	75	145
7	Samarinda Ulu	65	125	190
8	Sungai Pinang	70	150	220
9	Loa Janan Ilir	60	90	150
10	Samarinda Utara	85	60	145
Total		730	890	1620

Sumber: Dinas Sosial Kota Samarinda, 2020.

Berdasarkan sumber data dari Dinas Kota Samarinda sebagaimana Tabel 30, jumlah anak terlantar berdasarkan jenis kelamin di kota Samarinda terdata 1.620 anak yang terdiri atas anak laki-laki sebanyak 730 anak dan anak perempuan sebanyak 890 anak. Dari data di Tabel 30 di atas, terlihat bahwa jumlah anak terlantar perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki, yaitu sejumlah 55%. Jika dirinci berdasarkan kecamatan sebagai berikut. Kecamatan Palaran berjumlah 165 anak dengan rincian laki-laki terdapat 80 anak dan perempuan 85 anak. Kecamatan Sambutan berjumlah 150 anak dengan rincian laki-laki terdapat 60 anak dan perempuan 90 anak. Kecamatan Sungai Kunjang berjumlah 150 anak dengan rincian laki-laki terdapat 70 anak dan perempuan 80 anak. Kecamatan

Samarinda Seberang berjumlah 175 anak dengan rincian laki-laki terdapat 100 anak dan perempuan 75 anak. Kecamatan Samarinda Kota berjumlah 130 anak dengan rincian laki-laki terdapat 70 anak dan perempuan 60 anak. Kecamatan Samarinda Ilir berjumlah 145 anak dengan rincian laki-laki terdapat 70 dan perempuan 75 anak. Kecamatan Samarinda Ulu berjumlah 190 anak dengan rincian laki-laki terdapat 65 anak dan perempuan 65 anak. Kecamatan Sungai Pinang berjumlah 220 anak dengan rincian laki-laki terdapat 70 anak dan perempuan 150 anak. Kecamatan Loa Janan Ilir berjumlah 145 anak dengan rincian laki-laki terdapat 60 anak dan perempuan 90 anak. Kecamatan Samarinda Utara berjumlah 145 anak dengan rincian laki-laki terdapat 85 anak dan perempuan 60 anak.

4. Fakir Miskin

Fakir miskin merupakan jenis PMKS lain yang ditemukan di Kota Samarinda. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Adapun kriteria fakir miskin adalah (a) tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau (b) mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Tabel 27. Jumlah Fakir Miskin Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Palaran	8.044	7.784	15.828
2	Sambutan	4.948	4.852	9.800
3	Sungai Kunjang	7.851	7.853	15.704
4	Samarinda Seberang	6.494	6.132	12.626
5	Samarinda Kota	3.188	3.203	6.391
6	Samarinda Ilir	8.891	8.522	17.413
7	Samarinda Ulu	11.240	10.926	22.166
8	Sungai Pinang	7.722	7.520	15.242
9	Loa Janan Ilir	3.446	3.656	7.102
10	Samarinda Utara	12.417	12.002	24.419
Total		74.241	72.450	146.691

Sumber: Dinas Sosial Kota Samarinda, 2020.

Berdasarkan data Tabel 31 yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Samarinda, jumlah fakir miskin berdasarkan jenis kelamin di kota Samarinda tahun 2020 berjumlah 146.691 orang, terdiri atas laki-laki 74.241 orang dan perempuan 72.450 orang. Adapun uraian per kecamatan adalah sebagai berikut. Kecamatan Palaran berjumlah 15.828 orang dengan rincian laki-laki 8.044 orang dan perempuan 7.784 orang. Kecamatan Sambutan berjumlah 9.800 orang rincian laki-laki 4.948 orang dan perempuan 4.852 orang, Kecamatan Sungai Kunjang 15.704 orang dengan rincian laki-laki 7.851 orang dan perempuan ada 7.853 orang. Kecamatan Samarinda Seberang berjumlah 12.626 orang, dengan rincian laki-laki 6.494 orang dan perempuan ada 6.132 orang. Kecamatan Samarinda Kota berjumlah 6.391 orang dengan rincian laki-laki ada 3.188 orang dan Perempuan 3.203 orang, Kecamatan Samarinda Ilir ada 17.413 orang dengan rincian laki-laki 8.891 orang dan perempuan 8.522 orang. Kecamatan Samarinda Ulu berjumlah 22.166 dengan rincian laki-laki 11.240 orang dan perempuan 10.926 orang. Kecamatan

Sungai Pinang berjumlah 15.242 dengan rincian laki-laki 7.722 orang dan perempuan 7.520 orang. Kecamatan Loa Janan Ilir berjumlah 7.102 dengan rincian laki-laki 3.446 orang dan perempuan 3.656 orang. Kecamatan Samarinda Utara berjumlah 24.419 orang dengan rincian laki-laki 12.417 orang dan perempuan 12.002 orang.

5. Penyandang Disabilitas

Menurut Dinas Sosial Kota Samarinda, pada tahun 2020 di Kota Samarinda terdapat sejumlah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensori dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Adapun kriteria penyandang disabilitas menurut Kementerian Sosial adalah (a) mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktivitas sehari-hari; (b) mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari; (c) tidak mampu memecahkan masalah secara memadai; (d) penyandang disabilitas fisik—tubuh, netra, rungu wicara; (e) penyandang disabilitas mental—mental retardasi dan ekspsikotik; dan (f) penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

Tabel 28. Jumlah Penyandang Disabilitas (Cacat) Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Palaran	92	50	142
2	Sambutan	29	17	46
3	Sungai Kunjang	42	41	83
4	Samarinda Seberang	23	17	40
5	Samarinda Kota	41	27	68
6	Samarinda Ilir	50	47	97
7	Samarinda Ulu	67	43	110
8	Sungai Pinang	56	46	102
9	Loa Janan Ilir	16	8	24
10	Samarinda Utara	39	33	72
Total		455	329	784

Sumber: Dinas Sosial Kota Samarinda, 2020.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Samarinda yang dipaparkan pada Tabel 32, jumlah penyandang disabilitas (cacat) berdasarkan jenis kelamin di kota Samarinda tahun 2020 berjumlah 784 orang, terdiri atas laki-laki 455 orang dan perempuan 329 orang. Adapun uraian per kecamatan adalah sebagai berikut: Kecamatan Palaran berjumlah 142 orang dengan rincian laki-laki 92 orang dan perempuan 50 orang. Kecamatan Sambutan berjumlah 46 orang, dengan rincian laki-laki 29 orang dan perempuan 17 orang, Kecamatan Sungai Kunjang 83 orang dengan rincian laki-laki 42 orang dan perempuan ada 41 orang. Kecamatan Samarinda Seberang berjumlah 40 orang, dengan rincian laki-laki 23 orang dan perempuan ada 17 orang. Kecamatan Samarinda Kota berjumlah 68 orang dengan rincian laki-laki ada 41 orang dan perempuan 27 orang, Kecamatan Samarinda Ilir ada 97 dengan rincian laki-laki 50 orang dan perempuan 47 orang. Kecamatan Samarinda Ulu berjumlah 110 orang dengan rincian laki-laki 67 orang dan perempuan 43 orang. Kecamatan Sungai Pinang berjumlah 102 orang dengan rincian laki-laki 56 orang dan perempuan 46 orang. Kecamatan Loa Janan Ilir berjumlah 24 orang

dengan rincian laki-laki 16 orang dan perempuan 8 orang penyandang disabilitas. Kecamatan Samarinda Utara berjumlah 72 orang dengan rincian laki-laki 39 orang dan perempuan 33 orang.

F. Pemerintahan

Bagian ini menjelaskan posisi ASN dalam bidang pemerintahan. Pemerintah mengeluarkan regulasi terkait Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. PP Nomor 11 Tahun 2017 berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. PP ini bertujuan untuk mengelola pegawai negeri sipil (PNS) untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu.

Untuk penyelenggaraan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit, maka diperlukan pengaturan Manajemen PNS. Sementara itu, untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen PNS, sistem informasi pengembangan kompetensi, sistem informasi pelatihan, sistem informasi manajemen karier, dan sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun juga diperlukan, yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN. Sistem merit yang dikembangkan memberikan ruang kompetisi yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan untuk menunjukkan kemampuannya.

Jumlah ASN di Kota Samarinda pada tahun 2020 berdasarkan BKD Kota Samarinda adalah sebagai berikut.

Tabel 29. Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	3362
2	Perempuan	4387
	Jumlah	7749

Sumber: BKD Kota Samarinda, 2020.

Berdasarkan Tabel 33, ASN Kota Samarinda berjumlah 7749 orang, dengan rincian laki-laki 3362 orang dan perempuan 4387 orang. Jumlah ASN perempuan lebih banyak bila dibandingkan dengan ASN laki-laki, yaitu 56,6% untuk ASN perempuan sedangkan ASN laki-laki hanya 43,4%. Dari data tersebut terlihat bahwa keterwakilan perempuan dalam birokrasi di Kota Samarinda sudah baik, bahkan dapat dikatakan keterwakilan perempuan sudah tinggi karena dapat melampaui setengah dari jumlah ASN yang ada di Kota Samarinda. Data ASN pada Tabel 33, jika dirinci untuk setiap golongan ASN, dapat dilihat pada Tabel 34 berikut.

Tabel 30. Jumlah ASN Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	I/a	3	0	3

2	I/b	11	0	11
3	I/c	15	2	17
4	I/d	42	1	43
5	II/a	65	43	108
6	II/b	168	76	244
7	II/c	265	251	516
8	II/d	331	240	571
9	III/a	364	608	972
10	III/b	444	796	1240
11	III/c	359	480	839
12	III/d	464	581	1045
13	IV/a	697	1175	1872
14	IV/b	104	126	230
15	IV/c	29	8	37
16	IV/d	1	0	1
Jumlah		3362	4387	7749

Sumber: BKD Kota Samarinda, 2020.

Pada dasarnya PNS terdiri atas 4 pangkat golongan antara lain: golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV. Golongan I PNS merupakan golongan terendah di PNS yang terbagi lagi menjadi golongan I/a, I/b, I/c, dan I/d. Selanjutnya Golongan II PNS dibagi lagi menjadi golongan II/a, II/b, II/c, dan II/d. Kemudian, Golongan III PNS juga dibagi lagi menjadi golongan III/a, III/b, III/c, dan III/d. Terakhir adalah Golongan IV, yang terbagi juga menjadi lima golongan, yaitu golongan IV/a, IV/b, IV/c, IV/d, dan IV/e. Khusus golongan IV/e biasanya digunakan pada ASN dengan jabatan fungsional tertentu, misalnya dosen, apoteker, dan sebagainya.

Dari data Tabel 34 di atas terlihat bahwa pada ASN golongan I dan II lebih didominasi oleh ASN laki-laki, yaitu sebanyak 71 orang golongan I dan 829 orang golongan II, sedangkan untuk ASN perempuan hanya 3 orang golongan I dan 610 orang golongan II. Pada jenjang golongan III dan IV, ASN perempuan lebih mendominasi, yaitu 2465 orang golongan III dan 1309 orang golongan IV, sedangkan ASN laki-laki 1631 orang golongan III dan 1309 orang golongan IV.

Berdasarkan data golongan ASN pada Tabel 34, terlihat bahwa dominan ASN perempuan di Kota Samarinda memiliki jenjang golongan yang lebih tinggi dibandingkan ASN laki-laki. ASN perempuan mendominasi pada golongan IV/a. Walaupun demikian, pada jenjang golongan tertinggi, yaitu IV/d, tidak ada ASN perempuan yang mendudukinya, sedangkan ASN laki-laki dapat mencapai golongan IV/d, sebanyak 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya dorongan untuk ASN perempuan agar dapat meraih golongan lebih tinggi bahkan pada golongan tertinggi, yaitu IV/c maupun IV/d.

Di samping golongan, terdapat istilah eselon pada jenjang karier ASN. Banyak orang masih awam, tidak mengetahui beda golongan dan eselon ANS. Jika golongan melekat pada jenjang kepangkatan ASN, eselon ANS berkaitan dengan jabatan struktural. Eselon ASN merupakan jabatan struktural yang dibagi menjadi lima eselon antara lain sebagai berikut. Eselon I merupakan hierarki jabatan struktural yang tertinggi, terdiri atas dua jenjang: Eselon I/A dan Eselon I/B. Jenjang pangkat bagi Eselon I adalah terendah golongan IV/c dan tertinggi golongan IV/e. Ini berarti secara kepangkatan, personilnya sudah berpangkat Pembina yang makna kepangkatannya adalah membina dan mengembangkan. Tugas Eselon I, yaitu menetapkan kebijakan pokok agar sasaran jangka panjang dan jangka pendek dapat tercapai.

Eselon II merupakan hierarki jabatan struktural lapis kedua, terdiri atas 2 jenjang: Eselon II/A dan Eselon II/B. Jenjang pangkat bagi Eselon II adalah terendah Golongan

IV/c dan tertinggi Golongan IV/d. Ini berarti secara kepangkatan, personelnya juga sudah berpangkat Pembina yang makna kepangkatannya adalah membina dan mengembangkan. Jabatan lapis dua ini bertugas untuk merencanakan dan mengimplementasikan strategi untuk mengembangkan kebijakan pokok dari wilayah.

Eselon III merupakan hierarki jabatan struktural lapis ketiga, terdiri atas 2 jenjang: Eselon III/A dan Eselon III/B. Jenjang pangkat bagi Eselon III adalah terendah Golongan III/d dan tertinggi Golongan IV/d. Hal ini berarti secara kepangkatan, personelnya juga berpangkat Pembina atau Penata yang sudah mumpuni (Penata Tingkat I) sehingga tanggung jawabnya adalah membina dan mengembangkan. ASN Eselon III bertanggung jawab pada penyusunan dan realisasi strategi instansi yang berasal dari Eselon II.

Eselon IV merupakan hierarki jabatan struktural lapis keempat, terdiri atas 2 jenjang: Eselon IV/A dan Eselon IV/B. Jenjang pangkat bagi Eselon IV adalah terendah Golongan III/b dan tertinggi Golongan III/d. Ini berarti secara kepangkatan, personelnya berpangkat Penata yang sudah cukup berpengalaman. Makna kepangkatannya adalah menjamin mutu. Oleh karenanya di tingkat provinsi, Eselon IV dapat dianggap sebagai manajer lini satuan kerja (instansi) yang berfungsi sebagai penanggung jawab kegiatan yang dioperasionalkan dari program yang disusun oleh Eselon III.

Eselon V merupakan jenjang struktural terendah. Jenjang eselon ini tidak memiliki 2 jenjang seperti tingkatan eselon di atasnya. Untuk kepangkatannya sendiri terdiri atas golongan Penata Muda III/a hingga golongan Penata Muda Tingkat I III/b.

Sebaran ASN menurut jenjang eselonnya, dapat dilihat pada Tabel 35.

Tabel 31. Jumlah ASN Menurut Eselon dan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020

No	Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	II/A	1	0	1
2	II/B	27	4	31
3	III/A	41	12	53
4	III/B	85	40	125
5	IV/A	363	234	597
6	IV/B	154	128	282
7	V/A	15	16	31
Total		686	434	1120

Sumber: BKD Kota Samarinda, 2020.

Dari Tabel 35, terlihat bahwa ASN laki-laki masih mendominasi untuk jenjang eselon di ranah birokrasi Kota Samarinda. ASN laki-laki yang menduduki jabatan struktural berjumlah 686 orang (61,23%) sedangkan ASN perempuan berjumlah 434 orang (38,75%). Dari jumlah tersebut masih terdapat ketimpangan pada jabatan struktural ASN di Kota Samarinda karena jumlah ASN perempuan yang menduduki jabatan eselon jauh lebih sedikit dibandingkan ASN laki-laki. Sama halnya dengan jenjang kepangkatan ASN, untuk jenjang struktural ini pun, ASN perempuan belum ada yang menduduki eselon tertinggi di ranah birokrasi Kota Samarinda (eselon II/A), bahkan pada jenjang eselon II/B pun, masih didominasi oleh ASN laki-laki.

Rendahnya tingkat karier ASN perempuan ini dapat dikaitkan dengan fenomena *glass ceiling*, yaitu sebuah fenomena di mana perempuan mempunyai peluang dalam kenaikan kariernya akan tetapi ada penghalang yang tak terlihat yang membuat mereka terhambat dalam mendapatkan peluang tersebut. Ada beberapa faktor yang menghambat mobilitas ASN perempuan dalam kenaikan jabatan mereka, terutama dalam mendapatkan atau menduduki jabatan struktural atau jabatan yang menyebutkan mereka sebagai pemimpin.

Salah satu hambatan yang muncul misalnya ketika pola karier ASN yang mengharuskan mereka menjalani mutasi ke bidang lain sebagai jalur promosi. Kemungkinan yang paling utama adalah perempuan sulit dipromosikan karena harus mempertimbangkan anak dan izin suami. Selain itu, jabatan eselon yang lebih tinggi memiliki tuntutan jam kerja yang lebih panjang dan tidak fleksibel sehingga terjadi hambatan dalam pembagian waktu kerja dan keluarga. Alhasil, perempuan akan lebih memilih keluarga ketimbang karier. Hal seperti demikian akan jarang terjadi pada ASN laki-laki karena perempuan memiliki peran ganda, yaitu mereka harus membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan karena keduanya merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Sebenarnya, pola kenaikan jabatan ini sebagai hambatan tak kasat mata bagi ASN perempuan dan tidak terdeteksi oleh regulasi yang berlandaskan sistem merit, seperti UU ASN. Kebijakan rekrutmen dan promosi jabatan yang ada pada saat ini mengedepankan meritokrasi¹ dan abai terhadap realitas kesenjangan ASN perempuan dan laki-laki.

Selain permasalahan jenjang karier struktural, ASN di Kota Samarinda juga terdapat permasalahan tingkat pendidikan para ASN. Adapun rincian tingkat pendidikan ASN di Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel 36

Tabel 32. Jumlah ASN Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	41	0	41
2	SMP	72	8	80
3	SMA	929	785	1714
4	D-1	13	44	57
5	D-2	135	364	499
6	D-3	192	569	761
7	D-4/S-1	1679	2418	4097
8	S-2	296	196	492
9	S-3	7	1	8
Total		3364	4385	7749

Sumber: BKD Kota Samarinda, 2020.

Pada jenjang pendidikan SD, masih diisi oleh ASN laki-laki, yaitu 41 orang, sedangkan tidak ada ASN perempuan yang berjenjang pendidikan SD. Pada jenjang pendidikan SMP, jumlah ASN laki-laki masih mendominasi, yaitu 72 orang, dan 8 orang ASN perempuan. Pada jenjang pendidikan SMA juga terjadi hal yang sama, yaitu jumlah ASN laki-laki lebih banyak daripada ASN perempuan, yaitu 929 orang laki-laki dan 785 orang perempuan. Artinya, bahwa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, masih banyak ASN laki-laki ketimbang perempuan.

Hal yang terjadi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tersebut tidak terjadi pada jenjang pendidikan tinggi, khususnya pada jenjang D-1 sampai dengan jenjang D-4/S-1. Pada jenjang ini, jumlah ASN perempuan lebih mendominasi ketimbang ASN laki-laki, jumlahnya pun bervariasi dan bahkan selisihnya mencapai lebih dari setengahnya. Pada jenjang D-1, jumlah ASN perempuan sebanyak 44 orang, sedangkan laki-laki hanya

¹ Sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan sebagainya. Meritokrasi sebenarnya menunjuk kepada bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan yang dapat dipakai untuk menentukan suatu jabatan tertentu. Kerap dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin, tetapi tetap dikritik sebagai bentuk ketidakadilan yang kurang memberi tempat bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan untuk tampil memimpin.

13 orang. Jumlah ASN perempuan pada jenjang D-1 ini lebih dari tiga kali jumlah ASN laki-laki. Pada jenjang D-2 juga terjadi hal serupa. Jumlah ASN laki-laki pada jenjang ini sebanyak 135 orang, sedangkan ASN perempuan berjumlah lebih dari dua kali lipatnya, yaitu 364 orang. Di tingkat pendidikan D-3 pun demikian, jumlah ASN perempuan lebih mendominasi ketimbang ASN laki-laki, yang hanya berjumlah 192 orang. ASN perempuan hampir tiga kali lipatnya, yaitu 569 orang. Sedangkan pada jenjang D-4/S-1, jumlah ASN perempuan hampir dua kali ASN laki-laki, yaitu 2418 orang ASN perempuan dan 1679 orang ASN laki-laki.

Fakta yang terjadi pada jenjang pendidikan S-2 dan S-3 kembali didominasi oleh ASN laki-laki. Pada jenjang S-2, jumlah ASN laki-laki sebanyak 296 orang, sedangkan ASN perempuan sebanyak 196 orang. Walaupun jumlahnya hanya selisih 100 orang, tetapi hal ini menunjukkan adanya penurunan minat ASN perempuan untuk menempuh jenjang pendidikan ke tingkat S-2. Hal ini juga terjadi pada jenjang S-3. Pada jenjang pendidikan S-3, jumlah ASN laki-laki sebanyak 7 orang, sedangkan ASN perempuan hanya 1 orang saja yang memiliki jenjang pendidikan Doktorat. Analisis awal untuk fakta yang ditemukan pada ASN dengan jenjang pendidikan S-3 ini juga hampir sama dengan fakta pada jenjang pendidikan S-2, yaitu kurangnya minat ASN perempuan untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang S-3.

Jenjang pendidikan yang dimiliki ASN ini sebenarnya berkaitan dengan karier, karena pendidikan dapat menunjang karier sebagai ASN. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara formal berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku, dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Peningkatan jenjang pendidikan yang dimiliki ASN ini juga sebagai bentuk upaya mengembangkan karier ASN tersebut. Pendidikan merupakan salah satu unsur penting kompetensi ASN untuk menjawab tantangan beban tugas di masa mendatang.

G. Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum dilakukan oleh empat pilar penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, polisi, dan advokat.

Pada bagian ini akan dipaparkan jumlah aparat penegak hukum, penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, serta petugas pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Kota Samarinda.

1. Jaksa

Istilah *jaksa* dalam peradilan di Indonesia dan dalam mengemban tugasnya dikenal dengan istilah jaksa penuntut umum. Istilah tersebut tercantum pula dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1, menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Adapun tugas kewajiban dan wewenang jaksa juga diatur dalam UU tersebut, yang terbagi menjadi dua

bagian, yakni tugas secara umum dan tugas secara khusus. Tugas umum jaksa dapat diperinci dari pasal 30 s.d. pasal 34, sedangkan tugas khusus terdapat pada pasal 35 s.d. pasal 37.

Tabel 33. Jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Samarinda Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Pendidikan	2020		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sarjana (S-1)	6	5	11
2	Magister (S-2)	3	4	7
3	Doktor (S-3)	0	0	0
Total		9	9	18

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Samarinda, 2020.

Dari data Tabel 33, terlihat jumlah Jaksa di Pengadilan Negeri Kota Samarinda pada tahun 2020. Jumlah Jaksa laki-laki dan perempuan masing-masing 9 orang. Artinya terdapat keseimbangan peran serta laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang peradilan. Akan tetapi, jumlah ini jika dipilah berdasarkan tingkat pendidikan, akan terlihat perbedaan untuk Jaksa laki-laki dan jaksa perempuan. Pada Tabel 33 terlihat bahwa pada jenjang pendidikan sarjana, jumlah jaksa laki-laki lebih banyak ketimbang jaksa perempuan, yaitu 6 orang jaksa laki-laki dan 5 orang jaksa perempuan. Pada jenjang magister, jumlah jaksa perempuan lebih banyak ketimbang jaksa laki-laki, yaitu 4 orang jaksa perempuan dan 3 orang jaksa laki-laki. Dari jumlah tersebut dapat dimaknai bahwa pada jaksa perempuan lebih mendominasi untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (magister), walaupun selisihnya tidak terlalu signifikan.

Kemampuan jaksa juga perlu ditingkatkan, khususnya untuk menangani kasus-kasus khusus, seperti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di Samarinda, ada satu orang jaksa yang memiliki kompetensi dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 34. Jumlah Jaksa Negeri Samarinda yang Terlatih dalam Penuntutan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Kualifikasi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jaksa	0	1	1
Total		0	1	1

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Samarinda, 2020.

Pada Tabel 34, terlihat bahwa terdapat satu jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Samarinda yang memiliki kualifikasi dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan jaksa tersebut berjenis kelamin perempuan. Hal ini dapat dikaitkan dengan kepedulian sesama perempuan terhadap kasus-kasus yang menimpa perempuan maupun anak-anak. Kebutuhan jaksa yang terlatih ini juga telah diatur pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Jumlah Jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus tersebut di Kejaksaan Negeri Kota Samarinda terbilang rendah, bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan jaksa yang ada (hanya 1:18). Dengan kondisi demikian, perlu peningkatan komitmen Kejaksaan Negeri Samarinda untuk menambah

jumlah jaksa yang memiliki kualifikasi “terlatih” dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Hakim

Selain jaksa, juga terdapat hakim dalam proses penegakkan hukum. Berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Peranan hakim menjadi tugas utama tentunya menegakkan hukum dan untuk memimpin administrasi peradilan secara independen dan imparisial. Selain itu bahwa hakim memiliki kewenangan untuk; memeriksa perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan; mengadili dan memutus perkara tertentu dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang; memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah dengan mengedepankan keadilan dan kebenaran.

Tabel 35. Jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Kota Samarinda Tahun 2020

No	Pendidikan	Jumlah
1	Jumlah Hakim	11
2	Jumlah Hakim yang Terlatih Menangani Perkara Kekerasan	8

Sumber: Pengadilan Negeri Kota Samarinda, 2020.

Tabel di atas menunjukkan jumlah hakim di Pengadilan Negeri Kota Samarinda pada tahun 2020, yaitu sejumlah 11 orang hakim. Jumlah tersebut belum ada pemilahan antara hakim laki-laki dan hakim perempuan sehingga tidak dapat dilihat kesenjangan gender yang terjadi pada komposisi hakim di kota Samarinda. Sedangkan jumlah hakim yang terlatih menangani perkara kekerasan berjumlah 8 orang. Jumlah ini tentu lebih besar ketimbang jumlah jaksa yang terlatih menuntut dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, jumlah itu belum terpilah sehingga tidak dapat pula dianalisis kesenjangan gender yang terjadi.

3. Panitera

Selain hakim, juga terdapat panitera yang membantu hakim dalam proses penegakan hukum. Panitera adalah pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan. Definisi ini sesuai dengan Pasal 11 Ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehari-hari Panitera memberikan pelayanan teknis administratif kepada hakim di tempatnya bertugas, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun Pengadilan Militer. Pada saat persidangan bisa dilihat seorang panitera bertugas mengurus dan menyiapkan berkas perkara dan mencatat apa yang terjadi selama proses persidangan. Panitera mencatat dialog para pihak atau merekamnya lalu mentranskripsi pembicaraan. Paniteralah yang secara langsung mencatat poin-poin penting persidangan.

Tabel 36. Jumlah Panitera di Pengadilan Negeri Kota Samarinda Tahun 2020

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Panitera	8	6	14

Sumber: Pengadilan Negeri Kota Samarinda, 2020.

Pada data Tabel 27 di atas, jumlah panitera di Pengadilan Negeri Kota Samarinda berjumlah 14 orang dengan rincian 8 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Dari jumlah tersebut masih terlihat adanya kesenjangan jumlah panitera laki-laki dan perempuan. Jumlah tersebut masih dapat dikatakan lumrah karena tidak terlalu jomplang. Akan tetapi, perlu adanya komitmen dari Pengadilan Negeri Kota Samarinda untuk meningkatkan jumlah panitera perempuan.

4. Polisi

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Pada tingkat kota/kabupaten, dikenal dengan nama Kepolisian Resor atau yang disingkat Polres, yaitu struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut Kepolisian Resor Kota (Polresta). Polresta adalah singkatan dari Polres kota, di mana Polres ini berada di kabupaten/kota yang mempunyai tingkat kerawanan lebih tinggi dari kota/kabupaten lain. Polresta dipimpin oleh Kombes Pol. yang baru naik pangkat (junior).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Samarinda, jumlah personel Polresta Samarinda tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 37.

Tabel 37. Personel Polresta Samarinda Berdasarkan Kepangkatan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020

No.	Kepangkatan	Tahun 2020						Jumlah
		SMA		S-1		S-2 /S-3		
		L	P	L	P	L	P	
I	Perwira Menengah							
	Komisaris Besar Polisi	0	0	0	0	1	0	1
	Ajun Komisaris Besar Polisi	0	0	1	0	0	0	1
	Komisaris Polisi	3	0	10	0	3	0	16
	Jumlah	3	0	11	0	4	0	18
II	Perwira Pertama							
	Ajun Komisaris Polisi	8	2	12	1	0	0	23
	Inspektur Polisi Satu	16	0	22	0	3	1	42
	Inspektur Polisi Dua	25	1	16	1	1	0	44
	Jumlah	49	3	50	2	4	1	109
III	Bintara Tinggi							
	Ajun Inspektur Polisi Satu	119	1	23	0	0	0	143
	Ajun Inspektur Polisi Dua	131	0	20	0	0	0	151
	Jumlah	250	1	43	0	0	0	294
IV	Bintara							
	Brigadir Polisi Kepala	213	3	54	3	0	0	273
	Brigadir Polisi	47	0	31	1	1	0	80

	Brigadir Polisi Satu	91	25	15	0	3	0	134
	Brigadir Polisi Dua	42	0	0	0	0	0	42
	Jumlah	393	28	100	4	4	0	529
V	PNS							
	PNS	5	0	0	2	0	0	7
	Jumlah	5	0	0	2	0	0	7
	Jumlah Total	700	32	204	8	12	1	957

Sumber: Polresta Samarinda, 2020.

Berdasarkan Tabel 37, jumlah personel Polresta Samarinda adalah 957 orang yang terdiri atas beberapa jenjang kepangkatan dan PNS. Pada jenjang Perwira Menengah berjumlah 18 orang yang secara keseluruhan adalah laki-laki. Pada pangkat perwira menengah ini terdapat 4 orang berpendidikan S-2/S-3, 11 orang S-1, dan 3 orang SMA. Selanjutnya pada jenjang Perwira Pertama terdapat 109 orang personil. Dari jumlah tersebut didominasi oleh personil laki-laki, dengan rincian 49 orang berpendidikan SMA, 50 orang berpendidikan S-1, dan 4 orang berpendidikan S-2/S-3. Sedangkan jumlah personil perempuan pada jenjang perwira pertama berjumlah 3 orang berpendidikan SMA, 2 orang berpendidikan S-1, dan 1 orang berpendidikan S-2/S-3.

Jumlah personil laki-laki dibandingkan personil perempuan pada jenjang Bintara Tinggi juga hampir seluruhnya laki-laki. Dari 294 orang personil pada jenjang ini, hanya 1 orang personil perempuan, yaitu personil berpendidikan SMA, sisanya sebanyak 293 orang adalah personil laki-laki, terdiri atas 250 orang berpendidikan SMA dan 43 orang berpendidikan S-1. Kesenjangan tersebut juga terjadi pada jenjang Bintara, yang juga didominasi oleh personil laki-laki. Bintara dengan pendidikan SMA, terdapat 393 orang laki-laki dan 28 orang perempuan. Pada jenjang pendidikan S-1, terdapat 100 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Sedangkan pada jenjang pendidikan S-2/S-3 terdapat 4 orang personil yang seluruhnya adalah laki-laki. Terakhir, pada personil dengan status PNS berjumlah 7 orang, terdiri atas 5 orang laki-laki berpendidikan SMA dan 2 orang perempuan berpendidikan S-1.

Dari data yang ditampilkan pada Tabel 37, terlihat bahwa pada Kepolisian Resor Kota Samarinda masih terjadi kesenjangan yang sangat tinggi karena jumlah personil laki-laki sangat banyak ketimbang personil perempuan. Bahkan untuk jenjang pendidikan dan kariernya pun lebih banyak personil laki-laki yang mencapai jenjang pendidikan tinggi dan jenjang karier tertinggi yang ada di Polresta Samarinda.

Profesi polisi selalu diidentikkan dengan pekerjaan yang tidak lepas dengan kekerasan dan penggunaan kekuatan. Pada saat wanita memilih untuk berprofesi sebagai polisi tentunya mereka tidak bisa dilepaskan peran tradisional yang telah melekat pada dirinya sejak lahir. Polisi wanita harus bisa menjalankan kedua peran tersebut dengan baik agar tidak terjadi konflik pada diri mereka atau orang-orang di sekitar mereka sehingga peran polisi wanita yang di jalankan pada kedua wilayah tersebut dapat berjalan seimbang.

Sebenarnya polisi wanita memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan rasa aman yang berbeda dibandingkan antara perempuan dan laki-laki. Kehadiran polisi wanita menjadi inspirasi kesetaraan gender di lingkungan institusi kepolisian. Polisi wanita berperan sebagai *role model* bagi kesetaraan gender. Oleh karena itu, perlu dorongan di instansi kepolisian agar terwujud persamaan gender.

5. Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga dan Rumah

Tahanan pada Bab 1 Pasal 1 ayat (1) Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan Narapidana di Pasal 1 ayat (3) Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lapas. Selanjutnya Tahanan dalam Pasal 1 ayat (4) adalah seorang tersangka atau terdakwa yang di tempatkan di dalam Rutan.

Tabel 38. Jumlah Pegawai Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020

No	Rutan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Rutan Kelas II A Sempaja	100	13	113

Sumber: Rutan Kelas II A Kota Samarinda, 2020.

Pada Tabel 38 di atas terlihat bahwa jumlah pegawai Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II Kota Samarinda berjumlah 113 orang. Dari jumlah tersebut 100 orang (88,5 persen) adalah pegawai laki-laki dan sisanya sebanyak 10 orang (11,5 persen) adalah pegawai perempuan. Dominasi pegawai laki-laki yang begitu besar jumlahnya, disebabkan oleh persentase tahanan laki-laki di rutan. Di Rutan Kelas II A memang didominasi tahanan laki-laki ketimbang tahanan perempuan. Jumlah tahanan di Rutan Kelas II A Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel 39.

Tabel 39. Jumlah Penghuni Rumah Tahanan Kelas II A di Kota Samarinda Tahun 2020

No	Nama Rutan	Tahun 2020				Jumlah
		≤ 18 Tahun		≥ 18 Tahun		
		L	P	L	P	
1	Rutan Kelas II A Sempaja	0	0	1052	53	1105

Sumber: Rutan Kelas II Kota Samarinda, 2020.

Pada Tabel 39, jumlah penghuni Rutan Kelas II A Kota Samarinda adalah 1105 orang dengan rincian 1052 orang penghuni laki-laki dan 53 orang perempuan.

Tabel 40. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020

No	Lapas	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Lapas Kelas II A	70	14	84

Sumber: Lapas Kelas II A Kota Samarinda, 2020.

Berdasarkan Tabel 40 di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kota Samarinda khususnya Lapas Kelas IIA di dominasi oleh Laki-laki sebesar 70 orang (83%), sementara pegawai perempuan hanya 14 orang (17%). Hal ini menunjukkan bahwa *image* Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat yang banyak menggunakan kekuatan fisik dalam interaksi sehari-hari sehingga pekerjaannya lebih di

dominasi kaum laki-laki yang memiliki fisik lebih kuat dibanding perempuan yang kekuatan fisiknya lebih rendah.

Tabel 41. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II di Kota Samarinda Tahun 2020

No	Nama Rutan	Tahun 2020				Jumlah
		≤ 18 Tahun		≥ 18 Tahun		
		L	P	L	P	
1	Lapas Kelas II A	0	0	879	0	879

Sumber: Lapas Kelas II A Kota Samarinda, 2020.

Berdasarkan Tabel 41 di atas, jumlah penghuni Lapas Kelas II A Kota Samarinda semuanya adalah laki-laki, yaitu berjumlah 879 orang.

Tabel 42. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2020

No	Lapas	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Lapas Narkotika Bayur	108	10	118

Sumber: Lapas Narkotika Bayur Kota Samarinda, 2020.

Berdasarkan data pada Tabel 40 di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Samarinda khususnya di Lapas Narkotika Bayur, jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding perempuan yaitu 108 orang (92%) dibanding 10 orang (8%). Hal ini menunjukkan bahwa kaum laki-laki sangat mendominasi pada pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik maupun kebugaran tubuh dibanding dengan perempuan. Dan hal ini juga menunjukkan kurangnya minat perempuan untuk bekerja di sektor yang memiliki tingkat resiko terhadap fisik dan keamanan individu yang lebih besar.

Tabel 43. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Kota Samarinda Tahun 2020

No	Nama Rutan	Tahun 2020				Jumlah
		≤ 18 Tahun		≥ 18 Tahun		
		L	P	L	P	
1	Lapas Narkotika Bayur	0	0	1323	0	1323

Sumber: Lapas Narkotika Bayur Kota Samarinda, 2020.

Berdasarkan Tabel 43 di atas menunjukkan bahwa penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Kota Samarinda khususnya di Lapas Narkotika Bayur dihuni oleh laki-laki yang berusia di atas 18 tahun berjumlah 1323 orang (100%). Hal ini menunjukkan bahwa pengguna narkotika di Kota Samarinda adalah kaum laki-laki yang berada pada usia produktif di mana seharusnya sudah memasuki usia angkatan kerja. Bisa dimungkinkan banyak faktor pemicunya seperti putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, belum mendapatkan pekerjaan atau pengaruh dari pergaulan.

H. Usia Nikah

Usia nikah adalah usia minimum di mana orang diizinkan oleh hukum untuk menikah, baik sebagai hak atau kewajiban dari pihak orang tua atau bentuk perhatian lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019 usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Walaupun batas usia menikah sudah ditetapkan dalam undang-undang secara tegas namun di kalangan masyarakat kita masih ada yang melakukan pernikahan di bawah usia 18 tahun walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak. Hal ini pun terjadi di Kota Samarinda seperti tergambar pada tabel 38 berikut.

Tabel 44. Usia Nikah di Wilayah Kota Samarinda Tahun 2020

No	Kecamatan	Usia Nikah Laki-Laki						Usia Nikah Perempuan					
		<16	16	17	18	19	>20	<16	16	17	18	19	>20
1	Samarinda Ulu	0	1	1	6	15	915	1	3	7	11	0	0
2	Samarinda Ilir	0	0	0	0	5	391	0	0	4	8	0	0
3	Samarinda Seberang	0	0	0	2	11	482	1	1	3	12	0	0
4	Palaran	0	0	1	3	15	369	1	1	4	5	0	0
5	Samarinda Utara	0	0	2	1	13	601	0	2	3	11	0	0
6	Sungai Kunjang	0	2	2	4	19	1006	1	5	7	19	0	0
7	Samarinda Kota	0	0	0	0	1	183	0	0	0	1	0	0
8	Sambutan	0	0	2	3	9	395	1	1	8	9	0	0
9	Sungai Pinang	0	0	2	6	14	715	2	3	7	22	0	0
10	Loa Janan Ilir	0	0	0	1	7	409	0	1	7	5	0	0
	Jumlah	0	3	10	26	109	5466	7	17	50	103	0	0

Sumber: Pengadilan Agama Kota Samarinda, 2020.

Tabel 44 tersebut menggambarkan jumlah usia menikah selama tahun 2020 berdasarkan batas usia dan jenis kelamin. Menurut BKKBN batas usia nikah ideal untuk laki-laki adalah 25 tahun sedangkan perempuan adalah 21 tahun. Di Kota Samarinda usia nikah 16 tahun untuk laki-laki sebanyak 3 orang yang terdapat di Kecamatan Sungai Kunjang, 2 orang dan Samarinda Ulu 1 orang. Di Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Sambutan, dan Sungai Pinang masing-masing 2 orang dan di Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Palaran masing-masing 1 orang sehingga keseluruhannya jumlah usia nikah laki-laki berusia 17 tahun berjumlah 10 orang. Kemudian ada 26 orang laki-laki dengan usia nikah 18 tahun sebanyak 12 orang yang terdapat di Kecamatan Samarinda Ulu 6 orang dan Kecamatan Sungai Pinang 6 orang dan yang lain sebanyak 14 orang terdapat di Kecamatan Samarinda Seberang, Palaran, Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda Utara, Loajan Ilir dan Kecamatan Sambutan. Sedangkan usia nikah 19 tahun untuk laki-laki sebanyak 109 orang yang menyebar di semua wilayah kecamatan Kota Samarinda namun yang terbanyak terdapat di Kecamatan Sungai Kunjang sebanyak 19 orang dan paling sedikit di Kecamatan Samarinda Kota hanya 1 orang. Apabila ditotal secara keseluruhan usia nikah laki-laki di bawah 20 tahun sebanyak 148 orang. Walaupun masih terdapat pernikahan di bawah 19 tahun untuk laki-laki namun pada umumnya usia pernikahan terjadi di usia di atas 20 tahun yakni 5466 orang.

Berdasarkan data Tabel 44, di Kota Samarinda masih terdapat perkawinan usia dini di bawah 16 tahun untuk anak perempuan sebanyak 7 orang yang ada di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Seberang, Sambutan, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sungai Pinang dan Kecamatan Palaran. Untuk usia nikah perempuan usia 16 tahun sebanyak 17 orang yang terdapat di semua kecamatan kecuali kecamatan Samarinda Kota dan Samarinda Ilir. Kemudian usia nikah perempuan usia 17 tahun sebanyak 50 orang

yang tersebar di semua wilayah kecamatan kecuali Kecamatan Samarinda Kota. Jumlah terbanyak adalah usia nikah perempuan usia 18 tahun sebanyak 103 orang yang terdapat di semua wilayah kecamatan Kota Samarinda. Selama tahun 2020 tidak terdapat usia nikah perempuan usia di atas 19 tahun.

Tabel 45. Status Mempelai pada Saat Pernikahan di Wilayah Kota Samarinda Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki-Laki			Perempuan			Jumlah L + P
		Jejaka	Duda	Jumlah	Perawan	Janda	Jumlah	
1	Samarinda Ulu	811	127	938	773	165	938	1876
2	Samarinda Ilir	330	66	396	302	94	396	792
3	Samarinda Seberang	419	76	495	384	111	495	990
4	Palaran	333	55	388	310	78	388	776
5	Samarinda Utara	536	81	617	507	110	617	1234
6	Sungai Kunjang	917	116	1033	878	155	1033	2066
7	Samarinda Kota	163	21	184	152	32	184	368
8	Sambutan	360	49	409	334	75	409	818
9	Sungai Pinang	626	111	737	578	159	737	1474
10	Loa Janan Ilir	353	64	417	334	83	417	834
Jumlah		4848	766	5614	4552	1062	5614	11228

Sumber: Pengadilan Agama Kota Samarinda, 2020.

Apabila dilihat dari status pada saat pernikahan ada yang berstatus jika atau duda yang kesemuanya berjumlah 5614 yang terdapat di semua wilayah kecamatan dengan rincian yang berstatus jika saat terjadi perkawinan sebanyak 4848 orang dan duda sebanyak 766 orang. Sedangkan sebanyak 5614 adalah berstatus janda dan perawan dengan rincian yang berstatus perawan sebanyak 4552 dan janda sebanyak 1062 orang.

BAB V PENUTUP

Dari hasil analisis awal yang dilakukan pada bagian sebelumnya, terlihat bahwa masih terjadi kesenjangan gender pada beberapa aspek kehidupan di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan ranah pekerjaan serta kondisi sosial-ekonomi, seperti kondisi ASN, tenaga kesehatan, pencari kerja, pendidikan, dan sebagainya. Data yang dipaparkan pada buku *Profil Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2021* ini merupakan data awal sebagai data pembuka wawasan gender dan anak tahun 2021. Dalam proses pengumpulan data di masa pandemi Covid-19 ini, berbagai kendala dan tantangan telah dihadapi. Dengan demikian, semoga keterbatasan ini dapat dipahami bersama.

Data pilah yang dipaparkan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan membantu Pemerintah Kota Samarinda dalam melakukan analisis gender. Selain itu, bagi OPD di Kota Samarinda bisa menjadi panduan bagi SKPD terkait dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan. Dengan demikian, integrasi gender dalam proses perencanaan dan penganggaran bisa menjadi luaran yang diharapkan, sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 yang dapat diwujudkan oleh masing-masing OPD. Akhirnya, setiap dokumen kebijakan/program/kegiatan bisa menjadi panduan untuk memperhatikan aspek gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, S. S., Anwar, M. Z., Habib, N., Khan, Q., & Waqar, K. (2019). Identifying gender vulnerabilities in context of climate change in Indus basin. *Environmental Development*, 31(November 2018), 34–42.
<https://doi.org/10.1016/j.envdev.2018.12.005>
- Adibah, I. Z. (2017). Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Inspirasi*, 1(1), 172.
- Agung, D. A. G. (2015). Pemahaman Awal terhadap Anatomi Teori Sosial dalam Perspektif Struktural Fungsional dan Struktural Konflik. *Sejarah dan Budaya*, 9(2), 165–166.
- Aisyah, N. (2013). Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis). *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 203–224.
- Aksoy, H. A. (2018). Gendered Strategies between Democratization and Democratic Reversal: The Curious Case of Turkey. *Politics and Governance*, 6(3), 101–111.
<https://doi.org/10.17645/pag.v6i3.1423>
- Amaliah, D. (2015). Pengaruh partisipasi Pendidikan terhadap Persentase Penduduk Miskin. *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2(3), 231–234.
- Andik Wahyun Muqoyyidin. (2013). Wacana Kesetaraan Gender : Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam. *Al-Ulum*, 13(2), 491–512.
- Bahri, S. (2016). Perspektif Teori Struktural Fungsionalisme tentang Ketahanan Sistem Pendidikan Pesantren. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 40(1), 88–105.
<https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.221>
- Bales, R. F. (2017). *Social interaction systems: Theory and measurement*. Routledge.
- Bertens, K. (2006). *Psikoanalisis Sigmund Freud*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bragg, S., Renold, E., Ringrose, J., & Jackson, C. (2018). ‘More than boy, girl, male, female’: exploring young people’s views on gender diversity within and beyond school contexts. *Sex Education*, 18(4), 420–434.
<https://doi.org/10.1080/14681811.2018.1439373>
- Buckingham, S. (2004). Ecofeminism in the twenty-first century. *Geographical Journal*, 170(2), 146–154.
- Callamard, A. (1999). *A methodology for gender-sensitive research*. Vanier, Ont.: Amnesty International.
- Carroll, M., & Campbell, L. (2008). Who now reads Parsons and Bales?: Casting a critical eye on the “gendered styles of caregiving” literature. *Journal of Aging Studies*, 22(1), 24–31.
- Collins, R. (1987). A micro-macro theory of intellectual creativity: The case of German idealist philosophy. *Sociological Theory*, 5(1), 47–69.
- Davies, S. G. (2018). *Keberagaman Gender di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Deacon, R. E., & Firebaugh, F. M. (1988). *Family Resource Management: Principles and Application*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Elomäki, A. (2018). Gender Quotas for Corporate Boards: Depoliticizing Gender and the Economy. *NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research*, 26(1), 53–68.
<https://doi.org/10.1080/08038740.2017.1388282>
- Fauziah, L., & Mashudi, M. (2017). Reformasi SDM sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Adil Gender Di Kabupaten Sidoarjo. *Seminar IQRA*, 971–986.

- Frank, K. (2019). Analytical Studies Branch Research Paper Series A Gender Analysis of the Occupational Pathways of STEM Graduates in Canada. In *Statistics Canada: Analytical Studies Branch Research Paper Series*.
- Fujiati, D. (2014). Relasi Gender dalam Institusi Keluarga. *Muwazah*, 6(2), 32–54.
- Gauvin, L., Tizzoni, M., Piaggese, S., Young, A., Adler, N., Verhulst, S., ... Cattuto, C. (2020). Gender gaps in urban mobility. *Humanities and Social Sciences Communications*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.1057/s41599-020-0500-x>
- Hansmann, R., & Schröter, D. (2018). Equal Opportunities in Academic Careers? How Mid-Career Scientists at ETH Zurich Evaluate the Impact of Their Gender and Age. *Sustainability*, 10(9), 3343. <https://doi.org/10.3390/su10093343>
- Haraldsson, A., & Wängnerud, L. (2019). The effect of media sexism on women's political ambition: evidence from a worldwide study. *Feminist Media Studies*, 19(4), 525–541. <https://doi.org/10.1080/14680777.2018.1468797>
- Hasan, B. (2019). Gender dan Ketidakadilan. *Jurnal Signal*, 7(1). <https://doi.org/10.33603/signal.v7i1.1910>
- Huang, C.-Y., Liou, C.-F., Lee, S.-H., & Tsai, L.-Y. (2020). The Relationship Between Gender Role Orientation and Sexual Health Care in Taiwanese Nurses: A Structural Equation Model. *Sexual Medicine*, 8(3), 565–573. <https://doi.org/10.1016/j.esxm.2020.03.006>
- Ihsan, M. A. (2017). Perempuan Dan Media Iklan Suatu Analisis Ketidakadilan Dalam Media Sosial. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(2), 234–246. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.250>
- Juwita, R., Firman, F., Rusdinal, R., Aliman, M., & Malang, U. N. (2020). *Meta Analisis : Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan*. (January). <https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i1>
- Kang, J., Hense, J., Scheerso, A., & Keinonen, T. (2019). Gender study on the relationships between science interest and future career perspectives. *International Journal of Science Education*, 41(1), 80–101. <https://doi.org/10.1080/09500693.2018.1534021>
- Malau, W. (2015). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 125. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v6i2.2292>
- Millar, H., & O'Doherty, T. (2020). Racialized, Gendered, and Sensationalized: An examination of Canadian anti-trafficking laws, their enforcement, and their (re)presentation. *Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société*, 35(1), 23–44. <https://doi.org/10.1017/cls.2020.2>
- Mulawarman, W. G., & Rokhmansyah, A. (2018). *Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kalimantan Timur*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Musoke, D., Ssemugabo, C., Ndejjo, R., Ekirapa-Kiracho, E., & George, A. S. (2018). Reflecting strategic and conforming gendered experiences of community health workers using photovoice in rural Wakiso district, Uganda. *Human Resources for Health*, 16(1), 41. <https://doi.org/10.1186/s12960-018-0306-8>
- Puspitawati, H. (2012). *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita Indonesia*. Pt Penerbit Ipb Press.
- Quraisy, H., & Nawir, M. (2017). Kesetaraan Gender Pegawai Dinas Pertanian. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 106–115. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i1.518>
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Rosana, E. (2015). Konflik pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan

- Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Modern). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(2), 216–230.
- Rosmayati, E. (2019). *Feminisme Liberal dalam Novel Bandar Karya Zaky Yamani*.
- Salleh, A. (2017). *Ecofeminism as politics: Nature, Marx and the postmodern*. Zed Books Ltd.
- Sarasjati, G. M. (2016). *Representasi Nilai-Nilai Feminisme Liberal Dalam Film (Analisis Semiotik Film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dollar)*.
- Sevelius, J. M. (2013). Gender Affirmation: A Framework for Conceptualizing Risk Behavior Among Transgender Women of Color. *Sex Roles*, 68(11–12), 675–689. <https://doi.org/10.1007/s11199-012-0216-5>
- Sidi, P. (2014). Krisis Karakter dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 72–81. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2619>
- Simanjuntak, P. J. (2005). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suhlpti, R. (2016). Gender dan Permasalahannya. *Buletin Psikologi*, 3(1), 44–50. <https://doi.org/10.22146/bpsi.13386>
- Udasmoro, W. (2018). *Dari Doing ke Undoing Gender: Teori dan Praktik dalam Kajian Feminisme*. Yogyakarta: UGM Press.
- Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press.
- Widayanti, N., Hidayat, N., & Handayani, B. L. (2018). The Perception of Gender Equality Practices among CV Milzam Multi Sejahtera Jember Employees. *Jurnal Entitas Sosiologi*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.19184/jes.v7i1.16640>
- Zaini, N. (2014). Representasi Feminisme Liberal Dalam Sinetron: Analisis Semiotika Terhadap Sinetron Kita Nikah Yuk. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 18(3).
- Zakia, R. (2011). Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Adat Minangkabau. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 1(1), 39. <https://doi.org/10.15548/jk.v1i1.39>
- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan sebagai Penyebab Konflik: Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 157–183. <https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.4050>